



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI DALAM
PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MEWUJUDKAN
KETAHANAN EKONOMI DAERAH
(STUDI PADA DESA WISATA TEMBI KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

KURNIA DEWI SWAPRADINTA
NIM. 120170203014

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Petahanan

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN**

BOGOR
Februari 2019

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : KURNIA DEWI SWAPRADINTA
NPM : 120170203014
Program Studi : Ekonomi Pertahanan
Judul Proposal : Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Kol. Arh. Dr. Djoko Andreas Navalino, S.IP, M. AB.

Pembimbing 2 : Dr. Jupriyanto, ST, MT.

Penguji I : Kol. Caj (Purn) Dr. Thomas Gabriel J., M. Si

Penguji II : Dr. Supandi, S. Sos., M. M

Penguji III : Mayor Tek. Novky Asmoro, S. T., M. Si (Han)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 1 Maret 2019

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai kebutuhan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 1 Maret 2019

A yellow rectangular stamp with a grid pattern. The text on the stamp includes "METRIKAL", "KURNIA DEWI SWAPRADINTA", "NPM 236AFF428474954", "0300", and "STANISBRO RUMAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Kurnia Dewi Swapradinta

ABSTRAK

KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA DESA WISATA TEMBI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

KURNIA DEWI SWAPRADINTA

Desa Wisata merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pengembangan destinasi dan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan dengan kekhasan daerah seperti kebudayaan, kondisi alam atau wisata sejarah yang ditawarkan. Pengembangan desa dengan memberdayakan masyarakat setempat dapat memberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Sehingga pengembangan desa wisata diharapkan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan pembangunan serta menjadi langkah alternatif untuk mencapai kesejahteraan. Pengembangan desa wisata salah satunya dipengaruhi oleh adanya kelembagaan di desa wisata tersebut. Penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan ekonomi dan struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah studi pada Desa Wisata Tembi, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur kelembagaan yang digunakan desa wisata dan kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Penelitian dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan penggunaan dokumen yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan telah menggambarkan program dan tujuan pengembangan desa wisata, kapasitas kelembagaan ekonomi telah menunjukkan kompetensi yang optimal dalam pengelolaan potensi wisata, dan kompetensi pokdarwis dalam memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasarana sudah maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

Kata kunci: kapasitas, kelembagaan ekonomi, Desa Wisata, ketahanan ekonomi daerah.

ABSTRACT

CAPACITY OF ECONOMIC INSTITUTION IN DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE TO REALIZE REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE (STUDY IN DESA WISATA TEMBI, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

KURNIA DEWI SWAPRADINTA

Tourism Village is one of the strategic policies in developing destinations and the tourism sector carried out by the Ministry of Tourism. Development of tourist villages is expected to attract tourists with regional specialties such as culture, natural conditions or historical tourism offered. Village development by empowering local communities can provide opportunities to actively participate in building and developing existing tourism potential. So that the development of tourism villages is expected to have a positive impact on economic sustainability and development as well as being an alternative step to prosperity. One of the development of tourist villages is influenced by the existence of institutions in the tourist village. This study analyzes the economic institutional capacity and economic institutional structure in the development of tourist villages to realize the economic resilience of the study area in Tembi Tourism Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province. The purpose of this study was to determine the institutional structure used by tourism villages and economic institutional capacity in the development of tourism villages. It is hoped that it can contribute to community welfare and regional economic resilience. Research is carried out through interviews, observation and use of existing documents. This research approach uses descriptive qualitative methods. The results showed that the institutional structure had described the program and the purpose of tourism village development, economic institutional capacity had demonstrated optimal competence in managing tourism potential, and Pokdarwis competence in utilizing local potential including natural wealth was supported by maximum facilities and infrastructure so as to expand employment opportunities and capacity building so as to enhance the realization of regional economic resilience.

Keywords: capacity, economic institutions, tourism villages, regional economic resilience.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul “Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legiono Suko, S.I.P., M. AP selaku Retor Universitas Pertahanan.
2. Laksamana Muda TNI Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C., selaku Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.
3. Dr. Supandi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.
4. Kol. Arh. Dr. Djoko Andreas Navalino, S.IP, M. AB selaku Pembimbing 1 dan Dr. Jupriyanto, ST, MT. selaku Pembimbing 2 atas kesabarannya selama ini dan arahan yang diberikan kepada peneliti sehingga Tesis dapat terselesaikan.
5. Dewan penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.
6. Seluruh dosen, staff dan rekan-rekan mahasiswa Progra di Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.
7. Seluruh responden dan pihak-pihak yang telah banyak membantu peneliti selama proses pengumpulan data dan penulisan tesis ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan telah

berkenan membagi ilmu dengan peneliti sehingga karya ilmiah ini terselesaikan.

8. Seluruh keluarga tercinta, terutama Bunda Maharyuni Sri Pamuji Rahayu dan Babe Eko Budi Haryanto yang senantiasa mendoakan anaknya, Tante Limawati Dyah Listiana, juga untuk adik-adik tersayang Kelvin Vindiga Sakti Swapradinta Kinara Kanaya Puthy Aurelindra, Keenan Espresso Albar Nalendra dan Mas Nico Prosapia Martatama yang selalu memberi semangat.
9. Seluruh sahabat peneliti.

Peneliti sadari bahwa Proposal Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti harapkan kritik dan saran atas proposal ini. Hal tersebut guna menunjang kesempurnaan proses dan hasil penelitian ini.

Akhirnya, semoga Proposal Tesis ini dapat menjadi acuan penelitian, dan memberikan pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi stakeholder terkait dalam upaya pertahanan negara.

Bogor, September 2018

KURNIA DEWI SWAPRADINTA

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		
LEMBAR PENGESAHAN		ii
LEMBAR ORISINALITAS		iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH		iv
ABSTRAK		v
ABSTRACK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		x
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	14
	1.3 Rumusan Masalah	15
	1.4 Tujuan Penelitian	16
	1.5 Manfaat Penelitian	17
	1.5.1 Manfaat Teoritis	17
	1.5.2 Manfaat Praktis	17
BAB 2	KAJIAN TEORITIK	18
	2.1 Deskripsi Konseptual	18
	2.1.1 Pariwisata	18
	2.1.2 Kelembagaan	24
	2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	38
BAB 3	METODE PENELITIAN	43
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	43
	3.1.1 Tempat Penelitian	43
	3.1.2 Waktu Penelitian	43
	3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	44
	3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
	3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data	48

3.5	Teknik Analisis Data	51
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum	54
4.1.1	Kabupaten Bantul	54
4.1.2	Kecamatan Sewon	57
4.1.3	Dusun Tembi	59
4.1.4	Desa Wisata Tembi.....	59
4.2	Hasil Penelitian	60
4.2.1	Temuan Penelitian Subfokus Struktur Kelembagaan Ekonomi	61
4.2.2	Temuan Penelitian Subfokus Kapasitas Kelembagaan Ekonomi	65
4.2.3	Temuan Penelitian Subfokus Struktur Kelembagaan Ekonomi	69
4.3	Pembahasan	72
4.3.1.	Struktur Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi	72
4.3.2.	Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi.....	77
4.3.3.	Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah pada Desa Wisata Tembi	81
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Rekomendasi	86
	DAFTAR PUSTAKA	87
	LAMPIRAN	90
	LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN	91
	LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA	92
	LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama	3
Tabel 1.2 Kontribusi PAD dari Parwisata Kabupaten Bantul 2013	9
Tabel 1.3 Data Desa Kabupaten Bantul 2013	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan paling besar di dunia, memiliki garis pantai dengan panjang lebih dari 95.181 km dan jumlah pulau sebanyak 13.446 pulau. Indonesia memiliki kurang lebih 1.128 suku bangsa, 746 bahasa daerah, dan dialek serta berbagai adat budaya serta tradisi yang ada adalah laboratorium budaya paling besar di dunia. Bahkan terdapat 8 budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia sebagai *world cultural heritage*. Selain itu, Indonesia mempunyai 51 taman nasional yang berisi keanekaragaman hayati, 35 jenis primata, 25% epidemik, lingkungan bagi 16% hewan amfibi dan reptil di dunia, lingkungan bagi 17% burung yang ada di dunia, 26% dari epidemik yang dari keseluruhan yang ada memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pariwisata alam (*green tourism dan ecotourism*) yang merupakan salah satu jenis wisata yang tengah menjadi tren wisata dunia.¹

Berdasarkan data *Travel and Tourism Competitiveness Index* tahun 2017 yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, Keindahan alam Indonesia tersebut merupakan daya saing tersendiri karena sudah dikenal dunia sehingga dapat menempati peringkat ke 14. Peringkat pertama ditempati oleh negara Brazil. Negara Mexico diposisi kedua, diikuti Negara Costa Rica, Peru, China, Australia, Thailand, Tanzania, Spanyol, Amerika Serikat, Ekuador, Itali dan Perancis. Selain itu Indonesia dengan brand yang digunakan Kementerian Pariwisata yaitu *Wonderful Indonesia*, peringkat sektor pariwisata secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Pariwisata Indonesia menempati peringkat 70, kemudian pada tahun 2015 berada di peringkat 50. Peringkat

¹ Kementerian Pariwisata, *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*, (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015) , hlm 20.

pariwisata ini terus meningkat hingga naik 8 peringkat ke posisi 42 pada tahun 2017. Untuk meningkatkan aset sektor pariwisata, pemerintah juga semakin mengembangkan wisata kebudayaan serta memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah juga semakin meningkatkan keterbukaan secara internasional dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan, sehingga menjadi negara dengan kebijakan visa terkuat kedua.²

Saat ini, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2017, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 5% dari ekspor negara, sehingga pemerintah telah mengakui potensi yang ada pada sektor pariwisata dan menginvestasikan sekitar 9% dari anggaran untuk sektor ini. Tren kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto Nasional terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kontribusi yang diperoleh mencapai 489,62 triliun rupiah. Pada tahun berikutnya nilainya terus naik hingga mencapai 495,74 triliun rupiah. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pariwisata semakin meningkat yaitu sebesar kurang lebih 5% terhadap PDB Nasional atau sebesar 679,44 triliun rupiah. Sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap devisa sebesar 205,04 triliun rupiah. Penerimaan devisa pariwisata ini bila dibandingkan dengan komoditi ekspor lainnya berada di peringkat ketiga setelah batu bara dan minyak kelapa sawit. Peringkat sektor pariwisata ini juga terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki keunggulan karena merupakan sektor berkelanjutan yang mampu menyetuh semua level di masyarakat sehingga sektor ini mampu menyerap hingga 12 juta orang tenaga kerja.³

² World Economic Forum, *The Travel and Tourist Competitiveness Report 2017*, (Geneva: World Economic Forum, 2017), hlm 40.

³ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*, (Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2018), hlm 2.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama

Tahun	2015	2016	2017
Kontribusi terhadap PDB Nasional (Persentase)	4,25%	4,13%	5%
Kontribusi terhadap PDB Nasional (Triliun Rupiah)	489,62	495,74	679,44
Penerimaan Devisa (Triliun Rupiah)	175,71	176,23	205,04
Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Juta Orang)	10,41	12,02	14,04

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, 2017

Berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nation World Tourism Organization*, pertumbuhan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 tercatat terus meningkat hingga mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik sebesar 16,77% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan wisatawan dalam negeri sejumlah 277 juta perjalanan. Kecenderungan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara masih akan terus meningkat. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara pada negara berkembang akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat kunjungan ke negara maju. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke negara berkembang diprediksi akan dua kali lipat lebih besar. Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih besar dengan kekayaan alam dan wisata budaya yang dimiliki Indonesia.⁴ Akan tetapi, Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki tersebut karena permasalahan utama sektor wisata yaitu rendahnya daya saing. Berdasarkan data *Travel and Tourism Competitive Index* yang diterbitkan *World Economic Forum*, Indonesia

⁴ *Ibid.*, hlm 87.

yang berada di posisi 42 masih berada di bawah Singapura yang menempati posisi 13, Malaysia peringkat 26 dan Thailand pada posisi 34.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk mencapai target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 menetapkan fokus utama pada pengelolaan *Go Digital Tourism*, *Air Connectivity* dan *Homestay Desa Wisata*. *Go Digital Tourism* merupakan inisiatif pemerintah dalam menyikapi perkembangan di era global yang berpindah menuju ruang dunia maya secara digital. Terdapat tiga inisiatif strategi *Go Digital Tourism* yang dilakukan yaitu *War Room M-17*, *Go Digital* Kemenpar, dan ITX. *War Room M-17* berguna untuk memantau manajemen sistem informasi, ruangan ini berisi data terbaru dan terkini mengenai pergerakan angka pada sektor pariwisata baik internal maupun pesaing pariwisata Indonesia. *Go Digital* Kemenpar merupakan sistem informasi untuk kostumer untuk *Look Book Pay*. Sedangkan ITX atau *Indonesia Tourism Exchange* berupa pasar secara digital untuk sektor pariwisata yang dapat mempertemukan antara penyedia jasa dan penggunaanya di seluruh dunia. Inisiatif kedua berupa *air connectivity* yang merupakan program pemerintah untuk semakin meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar pulau melalui udara sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.⁵

Homestay Desa Wisata merupakan salah satu kebijakan strategis dari program pengembangan destinasi dan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Konsep Desa Wisata memadukan penginapan dengan harga yang terjangkau dengan pengalaman untuk dapat merasakan budaya lokal secara langsung. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan mengoptimalkan komunitas yang ada, sebagai pengembangan Desa Wisata. Terdapat konsep utama yang menjadi komponen penting dari Desa Wisata yaitu segi atraksi wisata dan amenitas. Dari segi atraksi wisata yaitu desa tersebut mempunyai daya tarik wisata secara spesifik pada wisata budaya dengan mengusung

⁵ *Ibid.*, hlm 101.

arsitektur tradisional dan lokasinya berada di desa yang memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Atraksi wisata dapat berupa atraksi wisata alam, atraksi wisata buatan, atraksi wisata budaya dan atraksi wisata sosial. Sedangkan segi amenities yaitu desa wisata sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk wisatawan dan masyarakat sekitar dengan pengelolaan yang sesuai standar internasional. Segi amenities tersebut meliputi akomodasi, restoran, transportasi, aktivitas yang ditawarkan, fasilitas pendukung lainnya, *retail outlet* serta pelayanan-pelayanan lainnya. Pengembangan Desa Wisata dibagi kedalam empat tipe yaitu konversi, renovasi, revitalisasi, dan pembangunan baru.⁶

Pengembangan Desa Wisata diharapkan dapat menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara dengan kekhasan daerah seperti kebudayaan, mata pencaharian, kondisi alam dan wisata sejarah yang ditawarkan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga diharapkan dapat memberi dampak yang positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya memperlihatkan bahwa pengembangan Desa Wisata belum berpihak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masuknya investor dari luar desa menciptakan sebuah daerah kompetisi ekonomi. Kompetisi ini terjadi tidak hanya dalam hal lapangan pekerjaan namun juga dalam hal kepemilikan modal. Kelompok pemilik modal setempat akan bersaing dengan pemilik modal yang kuat dari luar desa. Jika keadaan ini terus berlanjut maka akan menimbulkan kesenjangan antara masyarakat setempat dengan pemilik modal dari luar. Kesenjangan inilah yang nantinya akan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga perlu diberikan kesempatan untuk dapat menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Jika terus dibiarkan maka keberadaan pemilik modal dari luar desa dapat menguasai seluruh potensi yang ada di desa tersebut.

⁶ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, "Visi Misi Kemenpar, Homestay Dan Progress Homestay", dalam <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3740> , diakses pada 31 Agustus 2018.

Pengembangan desa wisata tersebut diharapkan dapat menjadi langkah alternatif untuk mencapai kesejahteraan dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sekitar dalam desa wisata tersebut. Pengembangan desa dengan memberdayakan masyarakat setempat dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Proses keterlibatan masyarakat nampak ketika proses memilih, merancang dan melaksanakan program. Masyarakat juga ikut terlibat dalam perencanaan model desa wisata secara keseluruhan. Sehingga keberadaan desa wisata juga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan mempertahankan keberadaan desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata sendiri dapat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, kekhasan daerah, kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana wisata⁷. Hal ini disebabkan karena keempat aspek tersebut mempunyai fungsi yang penting dalam peningkatan pelayanan dan kualitas produk pariwisata.

Keunikan, keaslian dan sifat khas dapat terlihat dari gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan pola perilaku penduduk yang tinggal di desa tersebut. Keaslian juga bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, geografis dan sosial dari daerah tersebut seperti budaya, pertanian, keindahan alam, serta sejarah yang ada. Segala sesuatu yang unik, bernilai dan keindahan alam yang dapat berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, maupun buatan yang menjadi tujuan kunjungan wisata merupakan daya tarik wisata. Kekhasan desa wisata berupa keaslian, keunikan, ciri khas dan keunggulan daerah yang secara langsung berhubungan dengan pola perilaku masyarakatnya

⁷ Sastrayuda, G. S, "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata", *Jurnal Info Sosial Ekonomi*, Volume 2, Nomor 1, hal 6-7 dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf , diakses pada 31 Agustus 2018

merupakan sebuah daya tarik dan keunggulan bersaing untuk produk desa wisata. Selain itu, keberadaan desa wisata dengan yang mengusung budaya pedesaan akan lebih bermanfaat karena dapat mengembangkan desa wisata tanpa merusak budaya yang ada.

Pengembangan desa wisata juga harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi sebuah keharusan dalam kawasan desa wisata agar kepuasan wisatawan dapat terwujud. Sarana dan prasarana menjadi penunjang sehingga daya tarik desa wisata semakin diminati oleh wisatawan. Bila sarana dan prasarana yang ada kurang memadai maka dapat mengurangi minat kunjungan dari wisatawan. Sarana dan prasarana tersebut berupa hotel, restoran, fasilitas rekreasi, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga dan sebagainya serta jalan dan transportasi. Maka pengembangan desa wisata berkelanjutan harus terus tumbuh secara kreatif dalam mengembangkan kekhasan dan keunikan yang baru untuk desa agar dapat menjadi keunggulan dan mampu bersaing dalam pembangunan daerah pedesaan dan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keseluruhan pengembangan desa wisata tersebut tidak mungkin terlepas dari peran aktif dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam proses perencanaan pengembangan desa wisata, daya tarik dan potensi yang ada sangat bergantung pada kemauan masyarakat untuk dapat bergerak aktif, kreatif, inovatif, dan dapat bekerja sama. Sehingga salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan desa wisata adalah keberadaan kelembagaan ekonomi dalam pengelolaannya. Salah satu lembaga ekonomi dalam pengembangan desa wisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan sebuah badan lokal yang berfungsi untuk mengkoordinasi partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan desa wisata secara kondusif.

Kelompok Sadar Wisata menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan pariwisata karena merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk menjadi agen pembangunan. Hal ini disebabkan karena keberadaan kelompok sadar wisata tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, sumber daya, kekhasan dan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Sehingga kelembagaan ekonomi dalam desa wisata merupakan sebuah wadah serta penggerak dalam memfasilitasi dan mengembangkan keterlibatan masyarakat. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata dalam masyarakat akan memaksa adanya hak kepemilikan (*enforcement of property right*). Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat akan merasa untuk memiliki aset desanya sehingga akan terus menjaga keberadaan desa tersebut dan terciptanya wisata berkelanjutan. Hak kepemilikan dalam masyarakat dapat memberikan insentif pada individu dalam melakukan berbagai kegiatan perekonomian.⁸

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata juga akan membatasi adanya pengaruh dari kepentingan politik dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan. Kelembagaan tersebut juga memberikan peluang yang sama (*equal opportunity*) kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, lebih spesifik dalam peningkatan kapasitas individu ataupun keterlibatan dalam aktivitas ekonomi produktif berupa pengembangan desa wisata. Selain itu, keberadaan kelompok sadar wisata dapat mendukung dan mendorong terwujudnya pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.⁹ Sehingga kelembagaan ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan desa wisata dengan adanya kelembagaan yaitu Kelompok Sadar Wisata.

Norman Uphoff dan Louise Buck juga menjelaskan bahwa keberadaan kelembagaan, fungsi dan kapasitas kelembagaan menjadi sebuah hal yang penting dalam mendorong keberlanjutan institusi lembaga lokal pedesaan dalam hal ini adalah desa wisata melalui berupa dukungan

⁸ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm 18.

⁹ *Ibid.*

berupa akses informasi, penyediaan secara langsung, akses yang disediakan dan menciptakan lingkungan yang baik. Pendekatan yang dapat digunakan dalam peningkatan kapasitas dari kelembagaan ekonomi dalam desa wisata yang berkelanjutan diantaranya adalah adanya pasar dan jaringan informasi yang dibutuhkan, kerjasama dengan mitra usaha atau pihak luar, dan peran kepemimpinan lokal.¹⁰

Bantul merupakan salah satu daerah destinasi wisata yang di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa ikon wisata yang terkenal wisata pantai diantaranya Pantai Parangtritis, Pantai Parngkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas dan Pantai Kuwaru. Kabupaten Bantul juga memiliki daya tarik wisata alam berupa Gua, seperti Gua Gajah, Gua Cerme, Gua Jepang, Gua Sunan Mas, Gua Payaman dan Gua Lawa. Selain itu Kabupaten Bantul memiliki objek wisata budaya seperti Masjid Kotagede, dan Makam Imogiri Yogyakarta. Kabupaten Bantul juga memiliki berbagai potensi wisata yang beragam diantaranya wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai jenis wisata lainnya.

Tabel 1.2 Data Desa Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Wisatawan	PAD
2012	2.356.578	8.640.795.150
2013	2.153.404	9.120.764.400

Sumber : Website Pemerintah Kabupaten Bantul, 2013

Salah satu potensi wisata yang diminati wisatawan saat ini adalah wisata minat khusus berupa desa wisata yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Konsep desa wisata yang sederhana dengan menawarkan keindahan alam suasana persawahan dan kerajinan lokal yang ada di dalamnya menjadi daya tarik

¹⁰ Uphoff N, Louise B, *Strengthening Rural Local Institutional Capacities*, (Washington, DC: Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), 2006), hlm 9.

tersendiri terutama bagi wisatawan yang jenuh dengan kesibukan aktivitas di perkotaan. Dalam Data Desa Wisata Kabupaten Bantul pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul yang memiliki 31 Desa wisata memiliki potensi kelembagaan ekonomi yang cukup besar. Desa wisata tersebut dibagi ke dalam tiga kategori yaitu embrio, berkembang dan mandiri.

Tabel 1.3 Data Desa Kabupaten Bantul

Kategori Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata
Mandiri	6
Tumbuh	14
Rintisan	11

Sumber : Website Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2013

Beberapa diantaranya merupakan desa wisata yang sudah mandiri, memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sadar wisata dan siap untuk menerima wisatawan manca negara yakni Desa Wisata Tembi. Permasalahan yang ada pada desa lainnya adalah kurangnya kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia atau kelompok sadar wisata dalam pengelolaan desa wisata. Desa Wisata Tembi merupakan desa wisata yang diketahui yang berawal dari pengelolaan kawasan wisata GMT (Gabusan-Manding-Tembi). Kawasan ini berguna untuk mengorganisasi dan mengembangkan pariwisata terpadu pada seluruh daerah Kabupaten Bantul. Kemudian dari gagasan Kawasan GMT ini terjadi pembagian daerah destinasi wisata sesuai potensi masing-masing dan Desa Wisata Tembi ditetapkan sebagai desa wisata berbasis kesenian dan kebudayaan yang paling potensial.

Faktor yang paling berpengaruh dalam kesuksesan pengembangan Desa Wisata Tembi dengan adanya kelembagaan yaitu Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Kelompok Sadar Wisata merupakan sebuah badan lokal atau kelompok yang dengan inisiatif, kemauan, kemampuan dan kesadaran sendiri muncul dan berkembang dari, oleh dan untuk

masyarakat dengan tujuan untuk mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan desa wisata secara kondusif. Kelompok sadar wisata mempunyai struktur organisasi yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi serta anggota yaitu masyarakat Desa Tembi. Peran dari pengurus cukup besar dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Tembi hingga dapat dikenal secara luas.

Berkaitan dengan terwujudnya ketahanan nasional adalah kondisi sebuah negara yang dinamis yang saling terkait satu sama lain dengan ketangguhan dan kegigihan berupa kemampuan dalam meningkatkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negara.¹¹ Salah satu gatra untuk mewujudkan ketahanan nasional adalah aspek ekonomi. Ekonomi sebagai salah satu gatra dalam konsepsi ketahanan nasional merupakan faktor penting dalam dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi dapat dibangun melalui berbagai sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor minyak dan gas, sektor pertanian, sektor manufaktur, sektor pariwisata serta berbagai sektor lainnya. Salah satu parameter bahwa sektor dalam perekonomian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap mewujudkan ketahanan ekonomi nasional adalah peran serta sektor tersebut dalam menyokong devisa negara.

Dalam beberapa periode sektor yang paling berperan dalam menyumbang devisa negara adalah sektor minyak dan gas. Akan tetapi tren ini telah berubah. Sejak tahun 2015, dimana harga komoditas pada sektor minyak dan gas mengalami penurunan akan sulit bagi Indonesia untuk menciptakan ketahanan ekonomi bila terus mengantungkan prioritas penerimaan devisa pada sektor ini. Sehingga Pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas yang dapat

¹¹ M. Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm 6.

memberikan sumbangan devisa paling besar sehingga dapat menciptakan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dengan banyaknya program pengembangan pariwisata pada setiap negara. Potensi keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam dapat menjadi modal untuk mengembangkan industri pariwisata. Potensi yang ada tersebut dapat dikembangkan dan dikelola menjadi kegiatan perekonomian yang dapat menghasilkan devisa.

Pada tahun 2015, pariwisata berada pada peringkat keempat sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu sebesar 12,2 juta dollar AS. Pariwisata berada di bawah sektor minyak dan gas yang menyumbang sebesar 18,5 juta dollar AS, minyak sawit mentah (CPO) yang menyumbang sebesar 16,4 juta dollar AS, dan batubara sebesar 14,7 dollar AS. Namun dikarenakan turunnya harga minyak, gas dan batubara, susunan sektor industri penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia mengalami perubahan. Pada tahun berikutnya, minyak sawit mentah (CPO) berada pada peringkat pertama sebagai penyumbang devisa terbesar yaitu 15,9 juta dollar AS. Sektor pariwisata berada diposisi kedua dengan capaian devisa sebesar 13,5 juta dollar AS.¹²

Penerimaan valuta asing atau devisa dapat berasal dari belanja para wisatawan asing, semakin besar belanja tersebut maka akan memperkuat neraca pembayaran negara tersebut. Tambahan pendapatan negara juga dapat diperoleh dari penerimaan pajak dari sektor usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Selain itu, belanja wisatawan tersebut dapat merangsang pertumbuhan pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang lain secara bertahap. Pertumbuhan yang sejalan dengan perekonomian merupakan dampak yang ditimbulkan dari majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan perusahaan yang menyediakan

¹² Yoga Sukmana. "3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/3-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>. Diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 11.32 WIB.

fasilitas penginapan seperti hotel, restoran, agen perencanaan perjalanan wisata, industri kerajinan, pramuniaga, tenaga terlatih yang diperlukan. Namun juga pada sarana dan prasarana perekonomian seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, bandara, pos dan telekomunikasi serta berbagai sektor perekonomian lainnya.¹³

Aspek lain yang penting dalam kebijakan ekonomi melalui kegiatan kepariwisataan adalah pembangunan daerah secara regional. Terlebih dalam menghadapi munculnya urbanisasi sebagai akibat semakin padatnya daerah perkotaan yang menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Pariwisata dengan potensi yang dimiliki sebagai penghasil devisa merupakan sebuah sarana dalam memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, dalam pembangunan daerah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah harus didasarkan pada realita dan potensi yang ada. Bila pengembangan ekonomi daerah tidak didasari dengan kondisi yang objektif maka pengembangan menjadi sulit bahkan dapat menyebabkan berhentinya roda perekonomian. Sehingga sejalan dengan hal tersebut, uraian obyek wisata yg menjadi andalan Kabupater Bantul, salah satunya desa wisata dengan adanya kelembagaan ekonomi. Dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya pengelolaan desa wisata yang baik oleh kelembagaan yang ada, maka akan tercapai juga ketahanan ekonomi secara nasional.

Di era globalisasi dan ditengah persaingan pasar bebas, maka partisipasi kelembagaan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sehingga dapat memenangkan persaingan. Bila produktivitas kemandirian ekonomi tidak tercapai, maka masyarakat Indonesia hanya mampu menjadi konsumen. Jika masyarakat hanya menjadi konsumen maka pertumbuhan perekonomian akan terhenti dan ketahanan ekonomi tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan karena

¹³ DR. James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987) , hlm 47.

pertumbuhan ekonomi suatu negara didukung oleh pertumbuhan perekonomian daerahnya.¹⁴ Oleh karena itu, ketahanan ekonomi daerah menjadi dasar ketahanan ekonomi nasional dan produktivitas ekonomi daerah menjadi syarat utama. Dalam hal ini, implemestasi ditunjukkan melalui dukungan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan desa wisata dengan kelembagaan yang ada untuk mewujudkan produktivitas daerah yang mampu mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, dan sarana prasarana yang ada. Aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan desa wisata. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kapasitas kelembagaan ekonomi dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian tesis yang berjudul **“Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kapasitas dari kelembagaan ekonomi terhadap pengembangan desa wisata.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menetapkan fokus dan sub fokus penelitian. Fokus penelitian ini mengenai Tingkat Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah Tingkat Kapasitas Kelembagaan terhadap perwujudan Ketahanan

¹⁴ Ilma Fatimah Yusuf, Edhi Martono, dan Agus Prasetya, “Peran Pemuda dalam Pengembangan Eduwisata Energi Terbarukan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Desa Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Ketahanan*, Volume 22, Nomor 3, 2016, hlm 3.

Ekonomi Daerah. Sedangkan secara spesifik penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang menjadi subfokus penelitian diantaranya :

1. Struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata pada Desa Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata pada Desa Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Desa Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa kelembagaan ekonomi merupakan bagian yang penting dalam pengembangan desa wisata. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai kapasitas dari kelembagaan ekonomi tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus dan perhatian dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisa kapasitas kelembagaan ekonomi. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata pada Desa Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata pada Desa Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah wawasan lebih mendalam serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan daerah dalam konteks ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi daerah akan memberikan manfaat pada pandangan mengenai kesejahteraan sebagai perspektif ekonomi, kedaulatan dalam pandangan pertahanan dan ketahanan ekonomi dalam pandangan ekonomi pertahanan. Selain itu, agar penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan dari ekonomi pertahanan dari sudut pandang ekonomi dan ketahanan ekonomi daerah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konsep dan model bagi para pengampu kepentingan dalam hal ini Pemerintah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, bagi Kelompok Sadar Wisata sebagai Pengelola Desa Wisata dan Pihak Swasta serta masyarakat sekitar obyek wisata dan wisatawan sebagai konsumen terhadap peran, manfaat dan kapasitas dari kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata yang mampu menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat, berperan dalam proses memilih, merancang dan melaksanakan program pengembangan desa wisata serta mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Bahwa yang dibahas dalam penelitian deskripsi konseptual adalah konsep Pariwisata, konsep Kelembagaan dan Konsep Ketahanan Ekonomi Daerah.

2.1.1 Pariwisata

2.1.1.1 Pengertian Pariwisata

Setiap orang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai macam cara dan juga dengan alasan yang berbeda. Akan tetapi perjalanan tersebut akan dianggap sebagai perjalanan wisata apabila perjalanan tersebut bersifat sementara, perjalanan bersifat sukarela tanpa paksaan dan perjalanan tersebut tidak menghasilkan upah. Akan tetapi terminologi pengertian pariwisata sendiri sangatlah beragam. Pariwisata tidak selalu memberikan arti ataupun ruang lingkup yang sama. Sebagai contoh yaitu adanya pengelompokan dalam pariwisata dapat berupa pariwisata dalam negeri (*domestic tourism*) atau pariwisata nasional (*national tourism*) dan pariwisata internasional (*international tourism*). Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa kategori tersebut tidak akan dianggap sama atau diperlakukan dengan cara yang sama terutama bila berkaitan dengan ekonomi.¹⁵

Pada dasarnya definisi Pariwisata dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu dari sisi *demand*, dari sisi *supply*, dan gabungan dari sisi *supply* dan *demand*. Kategori yang pertama adalah pengertian pariwisata dengan menggunakan pendekatan dari sisi wisatawan yang lebih dikenal dengan dimensi spasial berupa tempat dan jarak. Kategori kedua merupakan pengertian pariwisata yang dilihat sebagai industri/bisnis. Sedangkan kategori terakhir lebih memaknai pariwisata dari segi

¹⁵ DR. James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm 22.

akademis dan sosial budaya. Definisi pariwisata dari dimensi spasial lebih menekankan pada perpindahan wisatawan ke tempat yang lain jauh dari lingkungan mereka tinggal atau lingkungan kerja untuk jangka waktu yang sementara dan juga kegiatan yang dilakukan wisatawan selama berada di tempat tujuan wisata seperti yang diungkapkan oleh Airey. Sedangkan Pengertian yang diungkapkan oleh *World Tourism Organization (WTO)*, juga menggunakan sudut pandang spasial dengan menetapkan waktu dalam melakukan perjalanan wisata tersebut tidak melebihi satu tahun. Pengertian dari WTO berfokus pada tujuan dari perjalanan dilakukan, seperti untuk *leisure*, bisnis, dan tujuan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan di tempat tujuan wisata.¹⁶

Pengertian pariwisata dengan menggunakan dimensi spasial di Indonesia diungkapkan berupa kegiatan wisata, seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009 pasal 1, dimana wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dikerjakan oleh seorang individu atau kelompok dengan melakukan kunjungan ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi ataupun mempelajari kekhasan daya tarik wisata yang disinggahi dalam waktu sementara.¹⁷

Dari segi *supply*, pariwisata lebih dipandang sebagai sebuah industri atau bisnis. Pengertian pariwisata dari dimensi industri/bisnis lebih berfokus pada hubungan antara barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung terjadinya perjalanan wisata. Smith mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan gabungan dari beberapa usaha yang memasok barang dan jasa untuk memudahkan kegiatan bisnis, hiburan dan menggunakan waktu luang yang dilakukan di luar lingkungan tempat tinggalnya. Disamping itu, Smith dan French mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan hubungan antara barang dan jasa yang

¹⁶ I Gusti Bagus Rai Utama, S. E., M. A. *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014) hlm 15

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

digabungkan untuk menghasilkan pengalaman berwisata. Pengertian pariwisata sebagai sebuah industri atau bisnis dalam Undang-undang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 diungkapkan sebagai Pariwisata yang merupakan berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai sarana, prasarana dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, penggiat usaha, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.¹⁸

Dari sudut pandang Akademisi, Pariwisata diartikan secara lebih luas dengan melihat kedua sisi baik *supply dan demand* dimana kedua aspek tersebut saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Dari sudut pandang ini, Pariwisata diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari mengenai perjalanan manusia yang meninggalkan lingkungannya, sektor bisnis yang memberikan respon terhadap kebutuhan untuk melakukan perjalanan tersebut, serta dampak dari wisatawan dan pelaku bisnis terhadap lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi. Pengertian Pariwisata dari dimensi Sosial Budaya lebih menekankan pada usaha dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan, interaksi antara lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, serta kerangka sejarah dan budaya. Pengertian dari dimensi akademis dan sosial budaya dengan melihat pariwisata secara luas, di Indonesia diungkapkan dengan istilah kepariwisataan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, berupa serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta terdiri dari berbagai disiplin yang timbul sebagai kebutuhan individu, negara serta interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta.¹⁹

Pengertian Pariwisata di Indonesia, berdasarkan artikatanya berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata Pari dan Wisata. Kata Pari bermakna penuh, seluruh, atau semua, sedangkan Wisata berarti sebuah

¹⁸ | Gusti Bagus Rai Utama, *op. cit.*, hlm 17.

¹⁹ *Ibidl.*, hlm 18.

perjalanan. Sedangkan menurut Yoeti, bahwa sebuah perjalanan dapat dikatakan sebagai perjalanan pariwisata bila dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain di luar lingkungan tempat tinggal, tujuan dilakukannya perjalanan adalah untuk rekreasi tidak untuk memperoleh imbalan atau upah dan hanya sebagai konsumen. Menurut Wahab, pariwisata terdiri dari tiga unsur yaitu manusia sebagai pelaku kegiatan pariwisata, tempat sebagai fisik yang tercakup dalam kegiatan pariwisata dan waktu berupa tempo yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan dan berdiam di tempat tujuan wisata. Sedangkan menurut Spillane, pariwisata merupakan jasa dan pelayanan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, bisnis pariwisata dikelompokkan menjadi tiga yaitu usaha jasa pariwisata, perusahaan objek pariwisata dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan berbagai jenis kegiatan wisata yang melibatkan aspek sosial, budaya dan ekonomi yang membutuhkan perjalanan dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu di luar lingkungan biasa baik dengan tujuan rekreasi, mempelajari kekhasan daya tarik wisata, ataupun pengembangan wawasan dalam waktu sementara. Seiring dengan perubahan kebutuhan manusia, maka sektor pariwisata ikut terkena dampaknya dengan munculnya berbagai jenis pariwisata seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan, wisata desa, wisata budaya, dan wisata buatan yang memiliki daya saing yaitu wisata kuliner, wisata seni dan tradisi, wisata bahari serta wisata perkotaan dan wisata pedesaan. Munculnya berbagai jenis wisata ini merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata yang berusaha untuk menarik minat wisatawan agar dapat berkunjung ke berbagai daerah tujuan wisata bukan hanya di perkotaan saja. Pembangunan wisata pedesaan ditujukan untuk dapat menjadi model

²⁰ I Gusti Bagus Rai Utama, op. cit., hlm 20.

pengembangan wisata berkelanjutan sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

2.1.1.2 Desa Wisata

Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata minat khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari budaya dan keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata perdesaan. Pariwisata perdesaan merupakan model pariwisata baru, sering juga dikenal dengan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*). Obyek wisata perdesaan merupakan suatu desa yang mempunyai sarana atau obyek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata, sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi objek wisata baru.

Desa Wisata menurut Inskeep adalah salah satu jenis pariwisata dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam dan berada dekat dengan kehidupan tradisional pada desa yang jauh dari perkotaan serta mempelajari adat dan kebudayaan yang ada pada desa tersebut. Sedangkan Nuryanti menjelaskan bahwa Desa Wisata ialah sebuah bentuk penggabungan antara akomodasi, atraksi serta sarana dan prasarana pendukung yang ditawarkan dalam sebuah bentuk kehidupan masyarakat yang masih hidup secara tradisional. Sehingga yang menjadi komponen utama adalah akomodasi yang berupa tempat tinggal masyarakat lokal, atraksi berupa kehidupan tradisional sehari-hari dengan adat istiadat, arsitektur bangunan tradisional dan tata ruang pedesaan yang khas yang memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi secara

langsung dengan masyarakat setempat serta memiliki potensi wisata dan berbagai fasilitas pendukung yang dapat dikembangkan.²¹

Desa Wisata merupakan suatu daerah yang berhubungan dengan berbagai nilai-nilai yang tertanam di masyarakat setempat seperti adat, budaya, dan potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sesuai kemampuan dari masyarakat untuk kepentingan bersama. Kearifan lokal sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang unik dan hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu secara turun temurun dan terus berkembang, yang merupakan hasil interaksi masyarakat dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan.²² Menurut Oka Yoeti, Desa Wisata merupakan wilayah desa yang berkarakter khusus sehingga dapat menjadi tempat tujuan parwisata. Karakter tersebut diantaranya masyarakat yang masih melestarikan tradisi dan budaya yang asli, makanan khas, mata pencaharian yang tradisional, kondisi sosial pedesaan dan lingkungan alami yang masih terjaga.²³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah pedesaan yang nilai-nilai tradisional yang memiliki kekhasan dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti adat istiadat, arsitektur bangunan tradisional dan potensi daya tarik wisata yang ada sehingga memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Desa Wisata merupakan salah satu bentuk implementasi dari pengembangan sektor pariwisata yang akan secara langsung melibatkan masyarakat dan mampu memberikan manfaat terhadap kualitas hidup masyarakat setempat.

²¹ Ade Jafar Sidiq dan Risma Resnawaty, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Patisipasi Masyarakat Lokal di Desa Linggarjati Kuningan, Jawa Barat", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 4, Nomor 3, tahun 2017, hlm 2.

²² Hary Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglangeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata*, Volume 3, Nomor 2, tahun 2016, hlm 3.

²³ Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo, "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Teknik Pomits*, Volume 3, Nomor 2, tahun 2014, hlm 2.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak terhadap pemerataan sesuai dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Empat aspek utama yang mendukung dalam pengembangan desa wisata adalah kekhasan desa wisata, daya tarik dan objek desa wisata, sarana dan prasana pendukung serta kelembagaan yang ada. Kelembagaan menjadi salah satu komponen yang penting karena merupakan aspek penting yang menunjang kesuksesan pengembangan desa wisata. Penguatan kelembagaan dapat mendukung dalam fungsinya sebagai media dalam melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada. Kelembagaan juga dapat menjadi media penggerak yang memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan serta memberikan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat terlibat dan berpartisipasi dengan kearifan budaya yang ada dalam pengembangan desa wisata.

2.1.2 Kelembagaan

2.1.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 7 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dimana salah satu lingkup pembangunan kepariwisataan adalah kelembagaan kepariwisataan. Terdapat berbagai terminologi pengertian kelembagaan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Mubyarto yang dimaksud dengan lembaga merupakan organisasi atau norma-norma baik formal ataupun nonformal yang mengendalikan pola perilaku dan aktivitas anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin keseharian maupun dalam upaya untuk memperoleh tujuan. Pada dasarnya terdapat dua pengertian dari Kelembagaan yaitu: pertama, kelembagaan dipandang sebagai sebuah aturan main (*rule of the game*) dalam

melakukan interaksi personal. Kelembagaan sebagai aturan main dapat diartikan sebagai sekelompok aturan formal dan informal, yang tertulis maupun tidak tentang sistem hubungan manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan terhadap hak serta tanggung jawabnya. Kedua, kelembagaan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kedudukan. Kelembagaan sebagai organisasi akan merujuk pada lembaga-lembaga dengan aturan formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya.²⁴

Menurut Erani, kelembagaan merupakan konsep norma atau hak alami yang mengontrol tingkah laku dari individu. Definisi mengenai kelembagaan juga dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, apabila kelembagaan dimaknai berdasarkan prosesnya, sehingga kelembagaan merupakan sebuah upaya untuk membentuk sistem dalam berinteraksi antar pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi. Sedangkan bila dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan lebih berfokus untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan struktur kewenangan antar pelaku. Akan tetapi kelembagaan juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai tambah terhadap perekonomian.²⁵

Secara definitif menurut Rutherford, kelembagaan juga dapat dipahami sebagai sebuah peraturan perilaku yang secara luas dapat diterima dan dijalankan oleh anggota kelompok sosial dalam berperilaku untuk situasi tertentu, baik yang dimonitor sendiri maupun diawasi dari pihak luar (*external authority*). Sedangkan menurut North, memaknai kelembagaan sebagai aturan yang membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pola perilaku manusia untuk membangun struktur interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini kelembagaan mempunyai tiga komponen, yaitu peraturan formal, peraturan nonformal dan mekanisme penegakan. Aturan formal meliputi konstitusi, hukum, dan keseluruhan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan

²⁴ Mubyarto, *Membahas Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) , hlm 67.

²⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012) , hlm 25.

aturan nonformal meliputi agama, nilai-nilai tradisional masyarakat, dan pengalaman dari masing-masing individu. Terakhir adalah penegaakan, penegakan diperlukan dalam upaya agar kelembagaan dapat berjalan secara efektif.²⁶

Sedangkan menurut Djogo, Sunaryo dan Sirait, mendefinisikan bahwa kelembagaan merupakan sebuah rancangan pola dalam berperilaku secara sosial yang sudah tertanam dan terus berulang dalam jangka waktu cukup lama. Kelembagaan terdiri dari dua bagian utama yaitu kelembagaan dan keorganisasian. Dari segi kelembagaan berupa tingkah laku sosial yang pembahasannya utamanya mengenai norma, kepercayaan, nilai, gagasan, doktrin, kebutuhan, orientasi, keinginan dan lain sebagainya. Sedangkan segi keorganisasian berupa struktur sosial dimana pembahasannya utamanya mengenai peran, kegiatan, interaksi dari masing-masing peran, bauran sosial, perbandingan struktur secara teori dengan yang terjadi di sebenarnya, struktur pola kewenangan dan kekuasaan, sisi solidaritas serta kaitan antara aktivitas dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kelembagaan merupakan sebuah bentuk badan baik formal maupun nonformal yang mengatur dan mengontrol pola perilaku antar individu sesuai peran dan kewenangannya dalam kegiatan sosial ataupun ekonomi dalam mendukung tercapainya tujuan dalam organisasi. Kelembagaan dalam pengembangan desa wisata diperlukan guna mengatur keterlibatan dan peran aktif masyarakat serta mendukung pelaksanaan, pengembangan dan pemasaran untuk desa wisata yang telah memiliki program yang jelas dan memiliki sistem pengelolaan yang mumpuni sehingga tercapainya tujuan bersama agar keberadaan desa wisata dapat berkelanjutan.

²⁶ *Ibid.*, hlm 26.

²⁷ Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, "Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)", *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm 2.

Sebagai abstraksi dari berbagai pendapat ahli, Challen menyimpulkan beberapa karakteristik umum dari sebuah kelembagaan, yaitu:²⁸

1. Kelembagaan secara sosial dikelola dan didukung, umumnya kelembagaan memilah hambatan dari perilaku manusia, seperti hambatan secara biologis dan hambatan secara fisik.
2. Kelembagaan berupa peraturan baik formal maupun konvensional nonformal, serta cara berperilaku.
3. Kelembagaan seiring berjalannya waktu dapat berubah sesuai dengan tingkat aktivitas yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan hambatan yang ada.
4. Kelembagaan juga mengatur syarat dan larangan yang diterapkan dalam lingkungan sosial.

2.1.2.2 Kelembagaan Ekonomi

Pendekatan kelembagaan ekonomi berupaya untuk memberi pandangan baru terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, sosial psikologi, sejarah, hukum, politik, administrasi bahkan juga teknik. Kelembagaan Ekonomi mencakup dua arus hubungan antara ekonomi dan kelembagaan. Pendekatan ini mengulas dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi dan sebaliknya berupa pengembangan kelembagaan untuk merespon kegiatan ekonomi.²⁹ Hingga saat ini terdapat berbagai pengertian kelembagaan ekonomi dengan substansi yang hamper sama namun dalam berbagai perspektif. Dari sejarahnya, dasar dari kelembagaan sudah diawali sejak dahulu yaitu ahli kelembagaan dari tradisi Amerika Serikat (*American Institutional Tradition*) seperti Wesley Mitchell, Thorstein Veblen, John R. Commons dan Clarence Ayres. Selain itu terdapat jenis lain yang berhubungan dengan ekonom klasik seperti Adam Smith dan John Stuart Mill, Karl Marx, Schumpeter serta tokoh

²⁸ Ahmad Erani Yustika, *Op. Cit.* hlm 27.

²⁹ *Ibid.*, hlm 28.

neoklasik. Tradisi pertama dari *American Institutional Tradition* dikenal dengan Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama (*'old' institutional economics*), sedangkan tradisi berikutnya disebut dengan Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru (*'new' institutional economics*).³⁰

Ekonomi Kelembagaan Lama bersumber pada dua proyek penelitian. Proyek penelitian pertama yang diawali oleh Thorstein Veblen dan dikembangkan oleh Clarence Ayres lebih fokus untuk mengkaji mengenai dampak teknologi baru terhadap rancangan kelembagaan, serta deskripsi mengenai kesepakatan sosial yang ada dan meningkatkan kesejahteraan kelompok kepentingan untuk menolak perubahan. Proyek penelitian yang kedua dipimpin oleh John R. Commons dengan konsentrasi penelitian pada hukum, hak kepemilikan (*property rights*) dan organisasi yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi, transaksi ekonomi dan distribusi pendapatan.³¹

Ekonomi Kelembagaan Baru dikembangkan oleh banyak penulis namun memiliki ide yang sama. Salah satu peletak dasar ide ini adalah Ronald Coase yang mengembangkan gagasan mengenai organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan mengenai kebijakan kompetisi dan regulasi industri yang terjadi di Amerika Serikat, dimana terdapat anggapan bahwa semua akan tercapai dengan adanya kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. Ekonomi kelembagaan baru merupakan gagasan awal yang digunakan untuk membangun teori kelembagaan non-pasar dengan dasar teori ekonomi neoklasik. Ekonomi kelembagaan baru masih menggunakan asumsi dasar neoklasik tentang kelangkaan dan persaingan, namun menghilangkan asumsi mengenai rasionalitas instrumental yang menjadikan ekonomi neoklasik dikenal dengan 'teori bebas kelembagaan'.³² Ekonomi kelembagaan baru menunjukkan pentingnya peran kelembagaan, namun tetap menggunakan asumsi bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dengan menggunakan kerangka

³⁰ Ahmad Erani Yustika, *Op. Cit.* hlm 24.

³¹ *Ibid.*, hlm 25.

³² *Ibid.*, hlm 33.

ekonomi neoklasik. Pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru membentuk sebuah pandangan baru bahwa kelembagaan dan organisasi memiliki tujuan untuk dapat mencapai efisiensi, memperkecil keseluruhan biaya tidak hanya biaya produksi namun juga biaya transaksi.³³

Robbins mendefinisikan kelembagaan ekonomi menjadi sebuah studi tentang struktur hubungan dari sistem hubungan antara manusia yang mencakup tingkah laku dan keinginan individu dengan mempertimbangkan perilaku yang ada dalam kelompok dan tujuan yang akan dicapai kelompok tersebut. Dalam konteks perindustrian, kelembagaan ekonomi merupakan sekumpulan aturan yang berpengaruh terhadap bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengatur proses produksi dan penyediaan barang/jasa maupun proses interaksi dengan pelaku ekonomi yang lain.³⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan ekonomi adalah studi mengenai hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan pola perilaku yang ada dalam kelompok tersebut dalam melakukan proses produksi dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Kasper dan Streit dalam Erani, Kelembagaan Ekonomi meliputi dua arus hubungan antara kelembagaan dan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari adanya kelembagaan terhadap perkeonomian dan begitu juga sebaliknya, pengembangan dari kelembagaan sebagai respon terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi. Praktiknya, keberadaan kelembagaan dapat menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi hasil yang didapatkan dari aktivitas ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan memberikan pengaruh terhadap capaian ekonomi. Sementara, dalam jangka waktu tertentu, capaian nilai ekonomi yang diperoleh dari anggota kelembagaan dapat menciptakan aturan yang digunakan oleh kelembagaan itu sendiri. Kelembagaan dapat dikatakan tidak efisien

³³ Ahmad Erani Yustika, *Op. Cit.* hlm 35.

³⁴ *Ibid.*, hlm 27.

apabila gagal tercapainya pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan anggotanya.³⁵

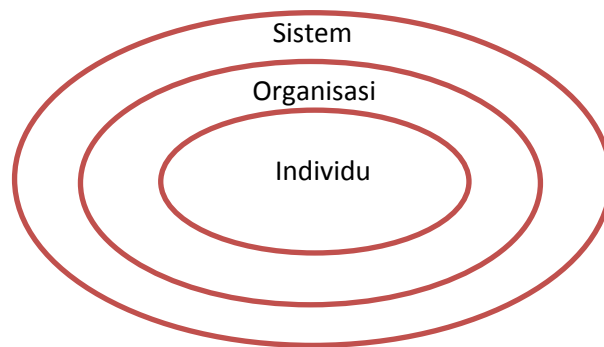
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut bahwa kelembagaan ekonomi adalah organisasi baik formal maupun nonformal, tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan aturan yang digunakan untuk kepentingan organisasi serta berhubungan dengan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan anggotanya. Sehingga kelembagaan ekonomi juga memiliki peran dalam menentukan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas ekonomi untuk memperkecil keseluruhan biaya produksi maupun biaya transaksi.

2.1.2.3 Kapasitas Kelembagaan

Menurut Djogo, Sunaryo dan Sirait kelembagaan berupa pola perilaku sosial yang sejak dahulu telah berkembang dan mengkar di masyarakat. Kelembagaan terdiri dari dua aspek utama yaitu kelembagaan dan keorganisasian. Aspek kelembagaan berupa perilaku sosial yang mengkaji mengenai nilai (*value*), norma (*norm*), *folkways*, *custom*, kepercayaan, doktrin dan lain-lain. Sedangkan aspek keorganisasian berupa struktur sosial yang mengkaji mengenai peran di masyarakat yang mencakup peran aktivitas, hubungan antar peran, hubungan sosial, struktur umum, struktur wewenang atau kekuasaan, hubungan kegiatan dengan tujuan yang akan dicapai dan lain-lain. Menurut Kapucu, Healy dan Arslan, Kapasitas merupakan kemampuan atau keahlian kepemimpinan dalam masyarakat yang mumpuni pada tingkatan tertentu dengan membawa perubahan yang berdampak positif. Menurut UNDP, kapasitas kelembagaan dapat ditemukan dalam tingkat kemampuan dari masyarakat berupa level individu, level organisasi, dan level sistem. Sedangkan menurut Chaskin, Kapasitas kelembagaan pada level sistem mencakup interaksi antar individu, kelompok nonformal, dan

³⁵ Ahmad Erani Yustika, *Op. Cit.* hlm 28.

organisasi formal yang membentuk hubungan sosial yang kemudian dikenal sebagai modal sosial.³⁶



Gambar 2.1 Tingkat Kapasitas Kelembagaan (UNDP,1997)

Menurut Milen, Kapasitas Kelembagaan merupakan level dalam organisasi yang berkaitan dengan struktur, budaya dan sistem tata kelola organisasi sehingga dapat mendukung individu untuk menunjukkan kompetensi yang maksimal. Sedangkan Menurut Damanik dan Weber, Kapasitas Kelembagaan merupakan kepebilitas organisasi dalam proses kepemimpinan dan koordinasi, melakukan kerjasama eksternal, mengembangkan serta melakukan promosi pada produk dan destinasi wisata.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Kelembagaan merupakan kemampuan kepemimpinan pada tingkatan tertentu terkait hubungan antar individu dan kelompok formal ataupun nonformal serta tata kelola organisasi sehingga dapat mengembangkan dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Parameter yang dapat digunakan dalam melihat kapasitas kelembagaan dalam hal ini dalam pengembangan desa wisata yaitu kesadaran akan pengelolaan

³⁶ Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, "Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)", *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm 3.

³⁷ *Ibid.*

potensi desa wisata, konsep awal desa wisata, pengembangan potensi desa wisata, keahlian untuk berinteraksi dengan wisatawan, mengelola daya tari desa wisata serta mengelola sarana dan prasarana pendukung.

2.1.3 Ketahanan Ekonomi Daerah

Ketahanan Nasional sebagai kondisi, ialah kondisi dinamik bangsa sebagai resultante hasil pembangunan fisik dan non fisik yang ukurannya adalah fungsi-fungsi keuletan, ketangguhan dan kemandirian dihadapkan dengan lingkungan strategis yang dihadapi.³⁸ Ketahanan nasional juga dapat dipahami sebagai sebuah konsepsi pertahanan yang bersifat semesta, serta bertujuan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan mendasarkan pada kekuatan diri sendiri.³⁹ Sistem ketahanan nasional pada dasarnya bersifat semesta bercirikan pada kerakyatan, artinya hal tersebut diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber daya (SDA dan SDM) yang ada didayagunakan sebagai upaya kepentingan sekaligus pertahanan nasional. Maka konsepsi ketahanan nasional (Indonesia) mencakup seluruh kehidupan nasional dirinci menjadi delapan aspek kehidupan, atau sering disebut sebagai Astagatra, yang terdiri dari trigatra dan pancagatra. Trigatra merupakan aspek-aspek yang memang sudah melekat pada suatu negara dan bersifat alamiah. Unsur trigatra meliputi aspek geografi, kekayaan alam dan kependudukan. Pancagatra merupakan aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut tata kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara yang diikat dengan aturan atau norma tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsep pancagatra sering disebut sebagai

³⁸ Kusumasari, A. D., "Peran Karang taruna dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga : Studi di Karang Taruna "Widya Taruna", Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Tesis*, (Universitas Gajah Mada, 2014).

³⁹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta,2008),

aspek sosial, yang mencakup unsur ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan.

Amin Ibrahim (2006) memformulasikan konsep ketahanan nasional sebagai metode pemecahan persoalan pembangunan sebagai berikut :

1. Analisis Potensi Wilayah (APW) meliputi analisis terhadap kondisi tata ruang wilayah/geografi, pemanfaatan/pelestarian sumber daya/kekayaan alam, demografi, ideologi-politik, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara,
2. Mekanisme kerja meliputi dimensi penyaluran aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh penyelenggara negara (terutama oleh badan-badan perencanaan sebagai intinya),
3. Dukungan sumber daya manusia, terutama penyelenggara negara dan pilar-pilar stake holders pembangunan (baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif),
4. Dukungan administrasi meliputi antara lain anggaran, sistem informasi dan tata laksana.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Ketahanan Nasional berfungsi sebagai kondisi atau merupakan tolok ukur bertahap keberhasilan pembangunan yang dinamis dan sekaligus berfungsi sebagai metode pemecahan permasalahan pembangunan. Adapun pendekatan pembangunan yang diterapkan pada skala daerah (wilayah) tersebut diimplementasikan dan diaplikasikan sebagai berikut :

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Begitupula dengan pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur juga membutuhkan prasyarat ekonomi. Maka dari itu, stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan agar ketahanan nasional dapat terwujud.

Ketahanan nasional memerlukan penyangga yang kuat berupa perekonomian yang kokoh dan meratanya kesejahteraan rakyat. Menurut Jack Snyder, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah syarat wajib bagi terwujudnya sistem demokratis dalam suatu negara. Sistem negara yang demokratis, tidak akan berjalan dengan baik bilak tidak ada ketahanan ekonomi. Berbagai studi mengenai hubungan antara demokrasi dengan ekonomi menunjukkan bahwa *income* (penghasilan) perkapita atau *purchasing power parity* (PPP) berhubungan dengan ketahanan demokrasi negara. Demokrasi bukanlah penentu utama prestasi perekonomian.⁴⁰

Menurut Pranowo dalam Ratih, Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi harus dipahami sebagai kondisi dinamis kehidupan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala macam gejolak ekonomi di tingkat domestik, regional, maupun internasional yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁴¹

Sementara itu, parameter ketahanan ekonomi dalam berbagai indikator, yaitu: (a) tingkat kemiskinan, (b) tingkat pengangguran, (c) ketimpangan pendapatan antar penduduk, (d) *purchasing power parity*, (e)

⁴⁰ M. Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm 67.

⁴¹ Ratih Azka Probovury, "Pengembangan Industri Kreatif Eceng Gondok Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Semarang", *Tesis Magister*, (Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2018), hlm. 11.

tabungan dan investasi masyarakat, serta (f) pertumbuhan penerimaan pajak per tahun dan presentase pemasukan pajak terhadap PDRB.⁴²

Kaitannya dalam mewujudkan ketahanan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi, seperti yang sudah diulas pada alinea di atas harus melibatkan semua elemen yang ada. Di tengah-tengah iklim globalisasi yang bermuara pada pasar bebas, maka pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu di dorong untuk meningkatkan daya produktivitas ekonomi, sehingga mampu bersaing dalam kompetisi tersebut. Tanpa adanya produktivitas kemandirian ekonomi, maka pemuda hanya akan menjadi konsumen, bukan produsen. Jika masyarakat Indonesia, khususnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa hanya sebagai konsumen, maka laju perekonomian suatu negara akan mengalami stagnasi, sehingga ketahanan ekonomi akan sulit untuk terwujud. Pasalnya, tingkat produktivitas kemandirian ekonomi akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.4 Keterkaitan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata dengan Ketahanan Ekonomi Daerah

Kapasitas kelembagaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Kelembagaan berfungsi untuk mengolah sumber daya dan distribusi nilai manfaat dalam upaya meningkatkan potensi desa wisata. Adanya kelembagaan berfungsi sebagai media sekaligus inisiator dalam memfasilitasi dan menumbuhkan kontribusi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kapasitas kelembagaan dengan pemberdayaan masyarakat maka akan berfokus pada pembelajaran dan peran serta masyarakat dalam menopang perekonomian masyarakat itu sendiri sehingga tercapainya peningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

⁴² Lemhannas. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2014).

Berkaitan dengan terwujudnya ketahanan ekonomi nasional adalah dengan melibatkan semua sumber daya nasional yang ada. Salah satunya dengan adanya kelembagaan ekonomi pada desa wisata. Pengembangan desa wisata banyak manfaat yang dapat di hasilkan secara ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merupakan bagian dari inti ketahanan nasional. Selain itu, dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya pengelolaan desa wisata yang baik oleh kelembagaan yang ada, maka akan tercapai juga ketahanan ekonomi secara nasional. Bila produktivitas kemandirian ekonomi tidak tercapai, maka masyarakat Indonesia hanya mampu menjadi konsumen. Jika masyarakat hanya menjadi konsumen maka pertumbuhan perekonomian akan terhenti dan ketahanan ekonomi tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi suatu negara didukung oleh pertumbuhan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi daerah menjadi dasar ketahanan ekonomi nasional dan produktivitas ekonomi daerah menjadi syarat utama. Dalam hal ini, implemestasi ditunjukkan melalui dukungan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan desa wisata dengan kelembagaan yang ada untuk mewujudkan produktivitas daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis dan pembahasan yang sesuai dengan judul serta permasalahan sebelumnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang diangkat. Rujukan ini diharapkan memberikan penjelasan yang lebih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sapja Anantanyu pada tahun 2009 yang berjudul Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kedinamisan kelompok sebagai sarana belajar untuk petani berada pada kategori sedang. Tingkat kapasitas petani juga berada pada tingkat sedang, sedangkan kemampuan petani sebagai pengelola usaha tani cukup rendah. Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani juga berada pada tingkat sedang, dalam aspek perencanaan, pemeliharaan dan penilaian hasil, petani kurang terlibat secara aktif. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi berupa rendahnya tingkat kedinamisan kelompok dan rendahnya kapasitas petani itu sendiri. Sedangkan rendahnya kapasitas dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepemimpinan lokal, intensitas peran pihak luar dan dukungan penyuluhan. Dukungan berupa penyuluhan pertanian memberikan pengaruh terhadap kapasitas petani, peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani serta mendorong kapasitas kelembagaan kelompok petani.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, E pada tahun 2014 yang berjudul Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) Hasil penelitian ini mengungkapkan

pengembangan potensi Kampoeng Ekowisata Bendosari melalui strategi *capacity buiding* memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, perbaikan infrastruktur dan meluasnya lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Ratri Prafitri pada tahun 2016 yang berjudul Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Sedangkan pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, organisasi menunjukkan kapasitas yang kurang baik. Sedangkan pada tingkat individu, individu memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	HASIL KAJIAN
1	Sapja Anantanyu, 2009; Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah)	Pendekatan Deduktif dan analisis deskriptif secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat tingkat kapasitas kelembagaan kelompok petani, partisipasi petani, faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, faktor yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan kelompok petani dan strategi yang diperlukan dalam peningkatan daya saing melalui kapasitas kelembagaan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kelompok sebagai sarana pembelajaran bagi petani berada pada kategori sedang. Kapasitas kelembagaan kelompok petani cukup rendah. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi berupa rendahnya tingkat kedinamisan kelompok dan rendahnya kapasitas petani itu sendiri. Sedangkan rendahnya kapasitas dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepemimpinan lokal, intensitas peran pihak luar dan dukungan penyulhan. Dukungan berupa penyulhan pertanian memberikan pengaruh terhadap kapasitas petani, peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani serta mendorong kapasitas kelembagaan kelompok petani.

NO	PENELITI	METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	HASIL KAJIAN
2	Damayanti, E, 2014; Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi <i>capacity building</i> Pemerintah Desa Bendosari dalam rangka pengembangan Kampoeng Ekowisata berbasis masyarakat lokal.	Pengembangan potensi Kampoeng Ekowisata Bendosari melalui strategi <i>capacity buiding</i> memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, perbaikan infrastruktur dan meluasnya lapangan kerja bagi masyarakat.
3	Gita Ratri Prafitri, 2016; Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kapasitas organisasi dan kapasitas individu dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger.	Analisis yang dilakukan pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata. Sedangkan pada aspek kepemimpinan

NO	PENELITI	METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	HASIL KAJIAN
	Ketenger, Banyumas)		dan koordinasi, organisasi menunjukkan kapasitas yang kurang baik. Sedangkan pada tingkat individu, individu memiliki kapasitas yang baik dalam merintis pengembangan potensi wisata. Individu memiliki kapasitas yang cukup baik dalam pengelolaan atraksi wisata, pengelolaan cinderamata, serta pelayanan terhadap wisatawan. Namun individu memiliki kapasitas yang kurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif sebagai pendekatan penelitiannya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk meneliti obyek dan situasi sosial secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan penggunaan dokumen yang ada. Penelitian ini didasari oleh kelembagaan ekonomi yang membawa dampak cukup besar dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana bentuk kelembagaan ekonomi dan kapasitasnya dalam desa wisata sebagai bentuk pengembangan desa wisata.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian tentang Kapasitas Kelembagaan dalam mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah pada Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui lokus penelitian di Desa Wisata Tembi.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2017/2018 yang berlaku di Universitas Pertahanan selama 7 bulan yakni bulan Juli hingga Januari 2018. Penelitian dimulai dari kegiatan penulisan proposal penelitian, pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta seminar hasil penelitian.

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Tahap Kegiatan	Tahun 2018-2019								
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	
1	Pembuatan Draft Proposal Penelitian									
2	Proses Pembimbingan									
3	Seminar Proposal Penelitian									
4	Perbaikan Proposal Penelitian									
5	Pengumpulan Data									
6	Analisis Data									
7	Penyusunan Laporan Penelitian									
8	Ujian Tesis									
9	Perbaikan Tesis									
10	Penyerahan Tesis									

Sumber : Data Diolah

3.2 Subyek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tingkat kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang kapasitas kelembagaan yang ada. Creswell mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah

individu sekelompok orang sebagai masalah sosial atau kemanusiaan.⁴³ Tujuan dalam penelitian kualitatif adalah menjelaskan cakupan informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, selain itu tujuan penelitian kualitatif bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.⁴⁴ Menurut Sugiyono, metode kualitatif dilandasi pada filsafat postpositivisme/enterpretif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁵

Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk menjelaskan mengenai tingkat kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata guna terwujudnya ketahanan ekonomi daerah bila dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau dokumen.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data dari beberapa informan terkait, khususnya dari pemangku kepentingan pada Desa Wisata Tembi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal penelitian, artikel majalah, laporan tahunan dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Arikunto, subyek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian, yang harus ditata

⁴³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 164.

⁴⁵ Sugiono, "*Metode Penelitian Manajemen*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 38.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 376.

sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data.⁴⁷ Dikarenakan subjek penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian, maka penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan atas pertimbangan tertentu agar mendapatkan informasi yang maksimal. Pertimbangan ini dapat didasari dengan pengalaman, pengetahuan dan jabatan, sehingga dianggap sebagai sumber yang paling menguasai tentang apa yang ingin diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil subjek dalam penelitian ini yaitu pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Desa Wisata Tembi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya Kepala Dukuh Tembi, Kepala Pengelola Desa Wisata Tembi, Kepala Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi, Koordinator Seksi-seksi dan Tokoh Masyarakat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, alat pengumpul data atau instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), prosedur pengumpulan data sangat tergantung pada diri peneliti. Sehingga, peneliti yang merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data, harus langsung turun ke lapangan secara aktif. Sugiyono menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam melakukan sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data”.⁴⁸ Pengumpulan data adalah teknik yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah dari narasumber. Creswell menyatakan bahwa tahapan pengumpulan data adalah upaya membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun

⁴⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Apta, 2007), hlm. 134.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 224.

tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang aturan untuk merekam/mencatat informasi”.⁴⁹

Bila dilihat dari sumber data, maka dalam pengumpulan data dapat memakai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data primer berasal dari observasi, teknik wawancara dan dokumentasi sementara itu sumber data sekunder berasal dari studi lapangan, literatur/kepuustakaan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tertulis dari instansi terkait, jurnal nasional, jurnal internasional, media elektronik, internet, dan media cetak. Data primer dalam penelitian ini berupa data dari beberapa informan yang berhubungan dengan tema penelitian. Informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan peran dan keterlibatan informan dalam kelembagaan dalam pengembangan desa wisata. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber seperti jurnal penelitian, artikel majalah, laporan, dan berbagai dokumen terkait kelembagaan dalam pengembangan desa wisata.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Menurut Nasution “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Sedangkan Marshall menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour”*. Melalui observasi peneliti belajar tentang

⁴⁹ John W Cresswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 253.

perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka Observasi penelitian dilakukan melalui pengamatan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Kelembagaan pada pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Teknik Wawancara

Peneliti dapat melakukan teknik wawancara untuk memunculkan pandangan serta opini terhadap penelitian. Menurut Sugiyono “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.⁵¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu Dokumentasi penelitian berupa pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono “Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁵² Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik.

3.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek

⁵⁰ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 226.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 231.

⁵² *Ibid.*, hlm. 240.

yang diteliti. Menurut Sugiyono “Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas)”.⁵³

Keempat jenis uji keabsahan data tersebut diantaranya :

1. Uji Kredibilitas (Uji validitas internal)

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Untuk mengetahui kredibilitas data yakni melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan member check. Adapun triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau

⁵³ *Ibid.*, hlm. 270.

dapat diterapkannya hasil penelitian. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Kriteria transferability merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability*

Pengujian dependability dalam penelitian kualitatif biasanya disebut pengujian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable* apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Uji *Confirmability* (obyektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Uji konfirmabilitas ini digunakan agar jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada yang akan melahirkan kebohongan/pemalsuan data dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ini peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan metode Triangulasi diantaranya triangulasi sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari informan dengan membandingkan antara informan lainnya. Triangulasi teknik dimana peneliti juga mengecek data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Terakhir peneliti menggunakan triangulasi waktu yakni melakukan teknik pengumpulan data pada waktu dan situasi berbeda untuk memperoleh data.

3.5 Teknik Analisis Data

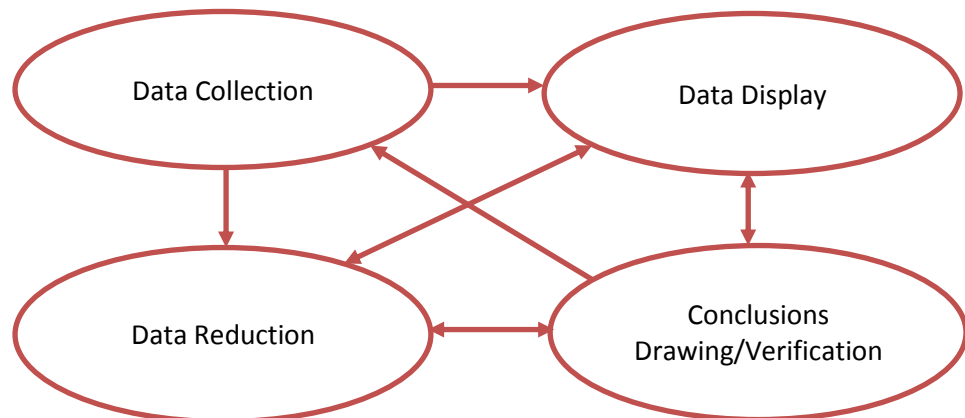
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Bogdan, “analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga sangat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain”.⁵⁴ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Menurut Creswell “analisis data dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar”.⁵⁵ Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milih data serta menyusunnya kembali.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.⁵⁶ Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation* dan *conclusion drawing/verification*. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data digambarkan sebagai berikut :

⁵⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 244.

⁵⁵ John W Cresswell, *Op Cit.*, hlm. 260.

⁵⁶ Sugiyono, *Op Cit.*, hlm. 246.



Gambar 3.1
Model Interaktif Miles dan Huberman

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. *Data Condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data diharapkan dapat mempermudah peneliti untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. Pendisplayan data ini dilakukan setelah data dikondensasi terlebih dahulu.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi dan Menarik Kesimpulan)

Hal selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan yakni melakukan pengumpulan data primer dan sekunder melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan penyederhanaan data yakni menggambarkan hasil wawancara, pengamatan dan foto kegiatan untuk disajikan melalui pembahasan secara umum hingga menarik kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian.

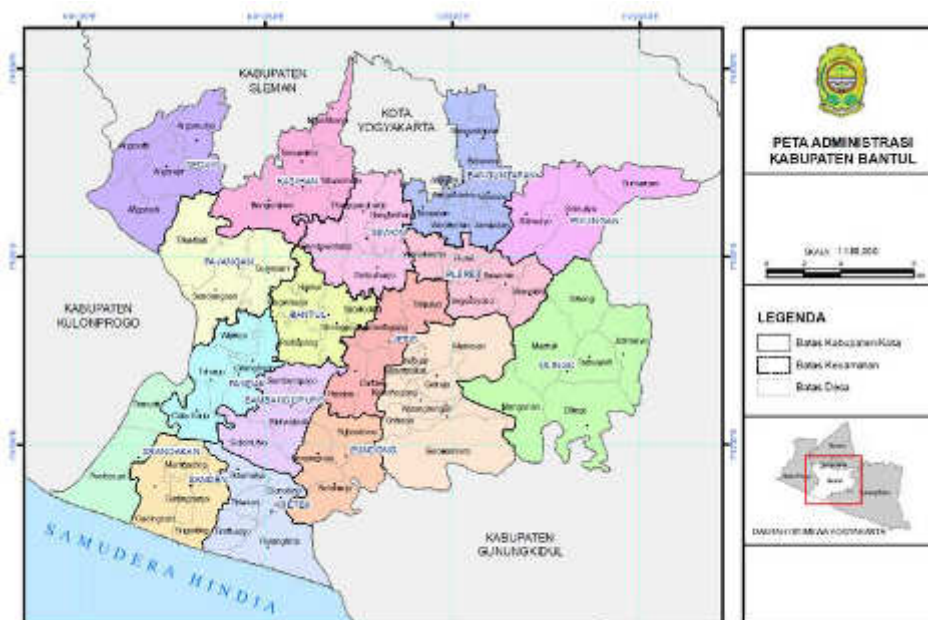
BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Bantul terletak pada posisi $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur, serta $7^{\circ} 44' 04''$ - $8^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul kurang lebih sebesar $506,85 \text{ km}^2$, dengan 77,64 persen dari wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter. Bagian utara wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah barat dengan Kabupaten Kulonprogo dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia seperti yang ditunjukkan peta wilayah sebagai berikut :

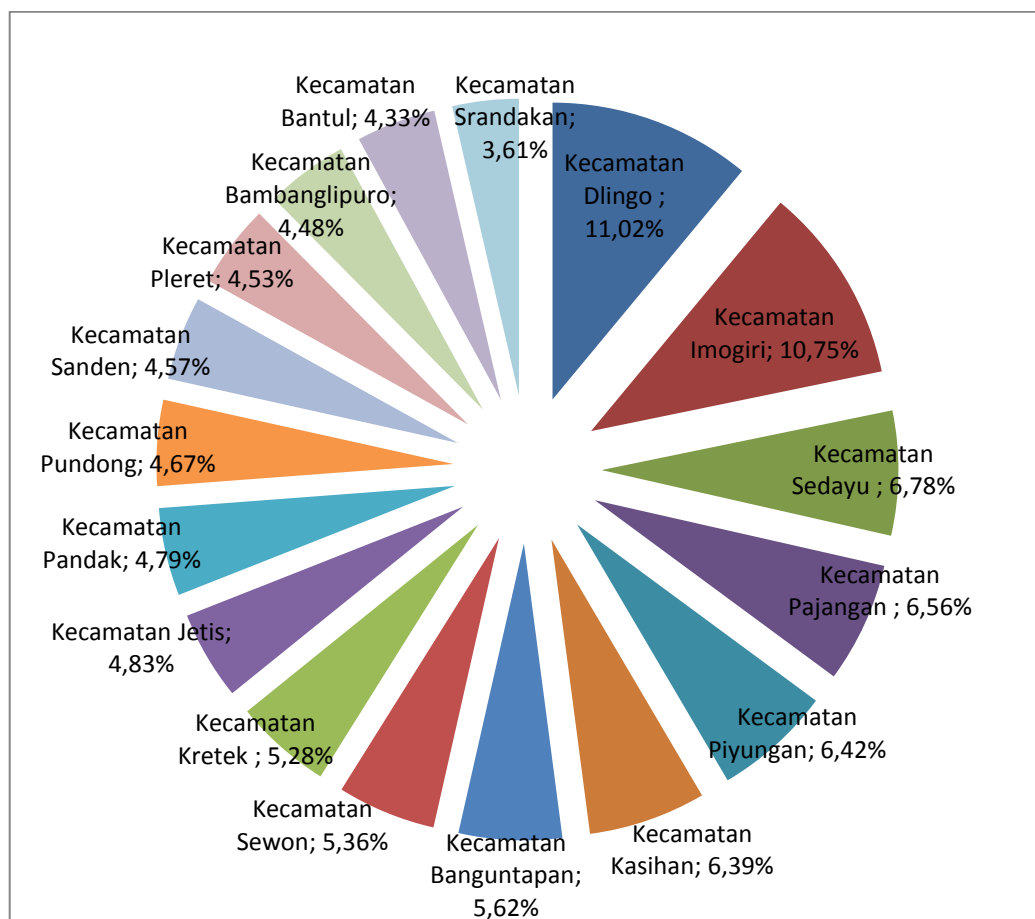


Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bantul

Luas wilayah Kabupaten Bantul sebesar 50.685 Ha terdiri dari 17 Kecamatan yaitu : Kecamatan Dlingo (5.587 Ha), Kecamatan Imogiri (5.449 Ha), Kecamatan Sedayu (3.436 Ha), Kecamatan Pajangan (3.325 Ha), Kecamatan Piyungan (3.254 Ha), Kecamatan Kasihan (3.238 Ha), Kecamatan Banguntapan (2.848 Ha), Kecamatan Sewon (2.716 Ha), Kecamatan Kretek (2.677 Ha), Kecamatan Jetis (2.447 Ha), Kecamatan Pandak (2.430 Ha), Kecamatan Pundong (2.368 Ha), Kecamatan Sanden (2.316 Ha), Kecamatan Pleret (2.297 Ha), Kecamatan Bambanglipuro (2.269 Ha), Kecamatan Bantul (2.196 Ha) dan Kecamatan Srandakan (1.832 Ha).



Gambar 4.2

Luas Wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Data Diolah

Kabupaten Bantul dengan dengan luas wilayah 506,85 km² pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 995.264 jiwa yang tersebar pada 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut diantaranya 502.177 jiwa adalah perempuan dan 493.087 jiwa adalah laki-laki. Dengan luas wilayah dan jumlah sebagaimana tersebut, diketahui kepadatan mencapai 1.964 jiwa per km² dan Kecamatan Banguntapan memiliki kepadatan tertinggi mencapai 5.008 jiwa per km² sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Dlingo yang dihuni 695 jiwa per km².

Sementara itu kondisi tingkat tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 11.563 orang pencari pekerjaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Sementara jumlah angkatan kerja pada tahun yang sama dengan kategori usia 15 tahun keatas berjumlah 558.978 orang terdiri dari 541.512 orang yang bekerja dengan presentase 97,13 % dan sebesar 2,87% atau sebanyak 17.466 orang yang merupakan pengangguran. Angka pengangguran yang cukup tinggi ini tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, namun juga berdampak pada berbagai masalah sosial, seperti kejahatan dan kemiskinan.

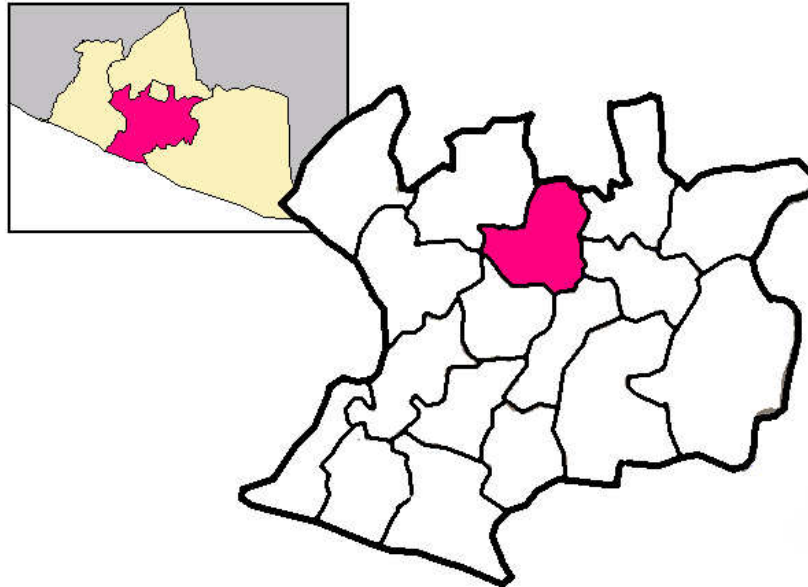
Kabupaten Bantul merupakan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan pantai selatan, sehingga memiliki beberapa obyek wisata pantai yang terkenal seperti Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai, Pantai Patehan, Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru. Keberadaan obyek wisata inilah yang dapat menarik minat wisatawan dan membuat Kabupaten Bantul dikenal luas. Potensi obyek wisata di Kabupaten Bantul cukup besar diantaranya terdapat juga obyek wisata alam, wisata budaya, pendidikan dan sentra industri kerajinan. Dengan kondisi wilayah, keanekaragaman potensi wilayah dan masyarakat di Kabupaten Bantul yang begitu lengkap maka akan mendukung perkembangan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan letak geografis yang berdekatan

dengan Kota Yogyakarta maka akses bagi wisatawan untuk berkunjung juga lebih mudah.

4.1.2 Kecamatan Sewon

Kecamatan Sewon merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon terletak di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27,16 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 115.683 jiwa. Secara administrative Kecamatan Sewon terdiri dari 4 desa/ keluarahan yaitu Desa Pendowoharjo, Desa Timbulharjo, Desa Bangunharjo, dan Desa Panggungharjo. Wilayah Kecamatan Sewon sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta, sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Banguntapan, sebelah Barat dengan Kecamatan Kasihan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis.

Kecamatan Sewon merupakan daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 53 meter diatas permukaan laut. Jarak antara Kecamatan Sewon dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul sejauh 8 km. Kabupaten bantul dengan dengan luas wilayah 27,16 km² pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 115.683 jiwa yang tersebar pada 4 Desa. Dari jumlah tersebut diantaranya 57.611 jiwa adalah perempuan dan 58.072 jiwa adalah laki-laki. Dengan luas wilayah dan jumlah sebagaimana tersebut, diketahui kepadatan mencapai 4.259 jiwa per km². Sebagian besar penduduk pada Kecamatan Sewon memiliki mata pencaharian sebagai pegawai/buruh pada berbagai perusahaan atau industri. Pada wilayah Kecamatan Sewon terdapat beberapa sentra industri kecil, diantaranya Pucung berupa sentra kerajinan patung kayu primitive, Bangunjiwo merupakan sentra kerajinan kulit serta sentra industri tempe di Desa Bangunharjo dan Desa Pendowoharjo. Kecawatan Sewon juga memiliki situs cagar budaya yaitu, Situs Karanggede dan Panggung Krapyak.



Gambar 4.3

Peta Wilayah Kecamatan Sewon

Sumber : Pemerintah Kecamatan Sewon

Letaknya cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yang terkenal menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Kecamatan Sewon juga berada dalam sebuah kawasan wisata yang mengintegrasikan sektor ekonomi, perdagangan, dan kesenian. Kawasan ini dikenal dengan Kawasan GMT yang merupakan kependekan dari Kawasan Gabusan, Manding dan Tembi. Kawasan juga GMT berfungsi untuk menyelaraskan dan mengembangkan pariwisata terpadu pada seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Ikon dari kawasan ini adalah Pasar Tradisional dan Seni Gabusan, Sentra Kerajinan Kulit Manding dan Desa Wisata Tembi. Ikon dari kawasan GMT tersebut merupakan bentuk merupakan pegelompokan daerah tujuan wisata berdasarkan potensi yang dimiliki masing masing daerah dan Dukuh Tembi ditunjuk sebagai desa dengan potensi wisata budaya dan kesenian.

4.1.3 Dusun Tembi

Dusun Tembi merupakan salah satu dari pedukuhan yang terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Pedukuhan ini terdiri dari 8 Rukun Tetangga. Dusun Tembi dipimpin oleh Ibnu Sutopo sebagai penjabat Ketua Dusun. Penduduk Dusun Tembi kebanyakan merupakan pegawai/buruh pada berbagai perusahaan atau industri. Sebagian juga merupakan pengrajin yang bekerja untuk membuat handicraft untuk di jual baik dalam wilayah D. I. Yogyakarta maupun luar kota. Walaupun Dusun Tembi terdapat area pertanian namun penduduk Dusun Tembi tidak menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utama mereka. Sehingga dalam Dusun ini terdapat berbagai macam profesi seperti petani, karyawan, buruh, ibu rumah tangga yang membuat aneka ragam kuliner.

Desa Tembi dulunya merupakan salah satu tempat yang digunakan abdi dalem untuk menitipkan dan merawat anak-anak raja di suatu tempat yang bernama Tembi. Tembi merupakan tempat yang sunyi dan jauh dari kegaduhan situasi yang ada untuk merawat anak-anak raja dibawah asuhan Kyai Tembini dan Nyai Tembini. Dengan berbagai peninggalan kebudayaan tradisional dari masa itu, seperti rumah joglo, kesenian, kebudayaan dan berbagai peralatan tradisional, Dusun Tembi ditunjuk sebagai desa dengan potensi wisata budaya dan kesenian yang kini lebih dikenal dengan Desa Wisata Tembi. Desa Tembi berada dalam sebuah kawasan wisata yang terintegrasi yaitu Kawasan GMT yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 31 Agustus 2007.

4.1.4 Desa Wisata Tembi

Desa Wisata Tembi merupakan sebuah dusun yang memiliki berbagai potensi wisata budaya dan kesenian, kemudian melekatkan istilah Desa Wisata yang kini lebih dikenal dengan nama Desa Wisata Tembi. Desa Wisata Tembi terletak di Jalan Parangtritis Km. 8,5 Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Desa Wisata Tembi didirikan pada tahun 2007. Desa Wisata Tembi menyuguhkan sebuah pengalaman untuk dapat

menikmati asrinya kehidupan di pedesaan dan melakukan kegiatan kerajinan yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Desa Wisata Tembi masih menjadi salah satu tujuan wisata unggulan untuk wisatawan yang ingin merasakan hijaunya persawahan dan keasrian kehidupan di pedesaan. Berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan di Desa Wisata Tembi diantaranya belajar untuk membatik, membuat kerajinan, membuat keramik, mewarnai keramik, membajak sawah, menanam padi bahkan hingga memandikan kerbau.

Desa Wisata Tembi terkenal dengan *Tembi Cultural House* atau Tembi Museum Jawa yang berada di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Tembi Museum Jawa adalah sebuah rumah Jawa tradisional yang didalamnya terdapat berbagai macam peralatan tradisional yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Jawa pada jaman dulu. Peralatan yang ada dalam museum tersebut diantaranya peralatan kesenian, senjata tradisional, peralatan permainan anak-anak, peralatan membatik, hingga peralatan memasak.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini diawali dengan tahap pencarian data, yang dilakukan melalui pencarian data internet dan narasumber melalui Kepala Dukuh Tembi, Kepala Pengelola Desa Wisata Tembi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi, Tokoh Masyarakat setempat hingga ke wilayah Desa Wisata Tembi sebagai objek lokasi penelitian.

Berdasarkan teori yang telah diungkapkan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Struktur Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata, dan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dipaparkan hasil penelitian

berupa data primer melalui wawancara dan observasi yang dianalisis dan dilihat kesesuaiannya. Adapun beberapa hasil riset atau temuan penelitian yang didapatkan pada saat penggalian data penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

4.2.1 Temuan Penelitian Subfokus Struktur Kelembagaan Ekonomi

Menurut pembahasan pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kelembagaan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Pada awalnya keberadaan kelompok sadar wisata ini sebagai implikasi dari pelaksanaan program pengembangan Kawasan Gabusan, Manding dan Tembi. Pada tahun 2007, pengelolaan Desa Wisata Tembi masih berbentuk komunitas wisata yang merupakan pelaksana program dari pengurus pada Kawasan GMT dan rapat yang dilakukan oleh para warga Dusun Tembi. Seiringan berjalannya waktu, masing masing dusun pada Kawasan GMT dapat berdiri sendiri. Manding dengan sentra kerajinan kulit menjadi Desa Wisata Manding, Gabusan dengan *showroom* pengrajin Kabupaten Bantul berdiri sendiri dengan pengelolaan manajemen dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dan Tembi menjadi Desa Wisata Tembi yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tembi. Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Tembi pada tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan Kepala Pengelola dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Tembi sebagai berikut :

Dulu awalnya ada komunitas Gabusan, Manding, Tembi. GMT *niku* berdiri tahun 2007, 31 Oktober. *Niku embrione sing desa wisata nggih. Dadikan* embrio dari desa wisata itu GMT. Komunitas Gabusan Manding Tembi itu dulu konsepnya terbentuk karena Gabusan, Manding dan Tembi terletak di jalan Jogja-Parangtritis, linear, satu jalur. *Dadi layout* atau lokasinya itu di jalan Jogja-Parangtritis jadi pinggir jalan semua *nggih*. Harapan dari kami dan temen-temen itu paling nggak wisatawan yang di Parangtritis itu mampir di Gabusan, Manding, dan Tembi karena masing-masing

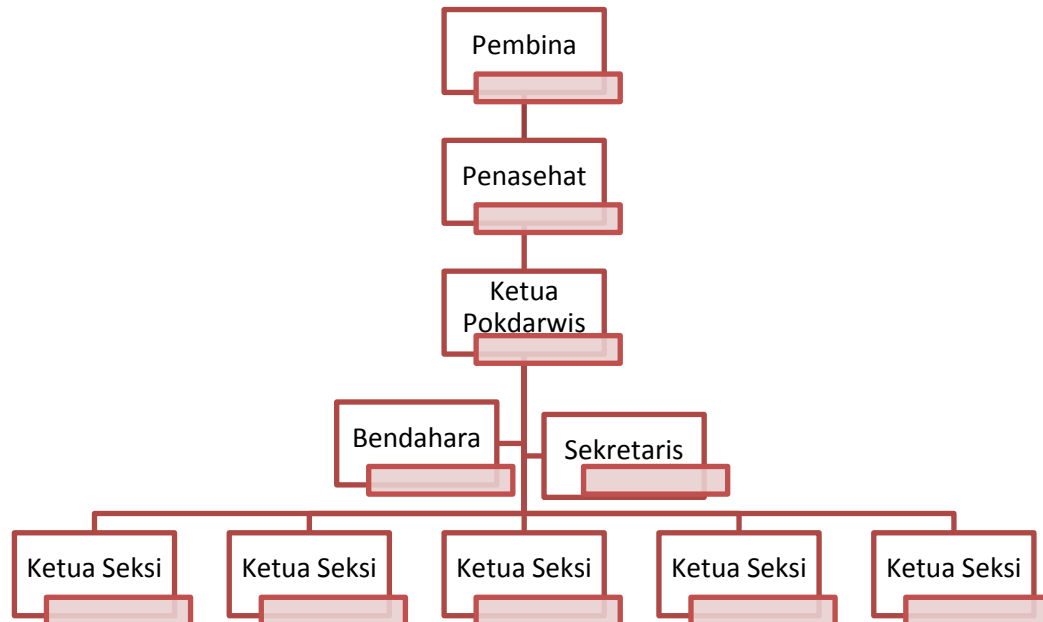
dusun Gabusan, Manding dan Tembi itu punya potensi sendiri-sendiri. Menurut data statistic Kabupaten Bantul, itu wisatawan Parangtritis waktu itu 2,5 juta sampai 3 juta per tahun. *Lha* itu berapa persennya mampirlah *ning* Gabusan, Manding, dan Tembi. Seiring berjalannya waktu masing-masing dusun tadi berdiri sendiri. Manding dengan kerajinan kulitnya berdiri sendiri, Desa Wisata Manding. Gabusan dengan showroom pengrajin se-Kabupaten Bantul berdiri sendiri dengan dikelola manajemen dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Terus Tembi juga menjadi desa wisata itu tahun 2010. Jadi tetap konsepnya sama, kamu dan temen-temen melanjutkan konsep dari awal GMT karena Tembi punya potensi sendiri berupa rumah-rumah ada yang masih banyak. Disamping tadi *layout*nya, lokasinya, kedua potensi nggih yang ketiga daya dukung masyarakat. Ada potensi dan lokasi yang baik, kalau daya dukung masyarakat nggak mendukung kan tidak akan terjadi desa wisata. Dengan daya dukung masyarakat jadilah GMT dan Desa Wisata Tembi. Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi itu ada SK dari Bupati nggih ya belum lama, 2015 kalo nggak salah. Itu kita sudah berjalan dan tahun 2015 kita pernah menjuarai Desa Wisata Terbaik di Kabupaten Bantul nggih. Di Tahun 2016, kita menerima award *nggih* dari *Asean Tourism Forum* di Filipina dan belum lama ini kita menerima lagi yang 2019 di Vietnam itu karena *homestay*.⁵⁷

Berkaitan dengan terbentuknya Desa Wisata Tembi berawal dari komunitas kawasan lalu berubah menjadi kelembagaan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tembi. Pengurus Pokdarwis Desa Wisata Tembi terdiri dari Pembina, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Seksi-seksi Kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan Kepala Pengelola dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Tembi sebagai berikut :

Awalnya kan Desa Wisata dari Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Itu orang-orang Pokdarwis ya yang mengelola desa wisatanya. Dalam pengelolaannya ada Pembina dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, penasehat itu Pak Lurah dan Pak Dukuh, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada ketua seksi-seksi kegiatan ada *out bound*, kerajinan, kesenian, kuliner, keamanan, pokoknya

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

sapta pesona dalam pariwisata itu kita akomodir semua. Pengurus Pokdarwis ini yang mengelola desa wisatanya.⁵⁸



Gambar 4.4

Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi

Sumber : Data Diolah

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) awalnya merupakan kelompok informal yang kemudian menjadi kelompok formal. Pokdarwis memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata. Keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona di desa wisata, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Awalnya kan Pokdarwis, Kelompok sadar wisata itu semacam kelompok yang informal terus lama kelamaan menjadi formal yang membidani desa wisata. Lha itu kelompok-kelompok yang ada di GMT itu kan Pokdarwis semua itu. Jadi setiap dusun ada kelompok

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

sadar wisata dengan mengusung potensi wilayahnya sendiri-sendiri. Pokdarwis juga mengakomodir temen-temen yang punya ide dalam mengembangkan potensi yang ada. Karena Pokdarwis kan tujuannya untuk menyadarkan warga bahwa wisata itu industri yang sangat menjanjikan kedepannya dengan menggarap potensi yang ada kita angkat. Potensi yang ada di Desa Tembi kita angkat pelan-pelan bersamaan dengan penjualan *homestay*, kuliner, kesenian dan lain-lain.⁵⁹

Dari Riset yang telah dilakukan terdapat beberapa kegiatan pengembangan desa wisata yang telah dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata. Pengembangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi tersebut diantaranya:

- a. Kegiatan pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan potensi wisata budaya dan kerajinan yang ada.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus Pokdarwis.
- c. Pelibatan peran serta masyarakat dalam memelihara potensi yang ada dan menciptakan atraksi wisata baru .

Peran dari Pokdarwis ya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan desa wisata karena pengurus desa wisata kan pengurus pokdarwis semua juga. Dulu awalnya juga kontradiksi, ada yang tidak percaya adanya desa wisata. Orang desa harus diberi contoh konkrit. Kalau enggak begitu nggak akan tertarik. Misalkan *homestay* waktu itu cuma 1 atau 2, sekarang sudah banyak sekali ada 92 kepala keluarga yang punya *homestay* sekarang. Setelah diberi pengarahan dari Pokdarwis, masyarakat mulai mengerti.⁶⁰

Beberapa capaian dari Desa Wisata Tembi sebagai hasil dari berbagai uraian kegiatan yang telah dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Beberapa capaian tersebut diantaranya jumlah kunjungan wisatawan yang datang setiap bulannya mencapai kurang lebih 600 wisatawan pada hari biasa dan mencapai 900 kunjungan wisatawan pada

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

masa liburan. Selain itu, Desa Wisata Tembi berhasil menjuarai desa wisata terbaik di Kabupaten Bantul pada tahun 2015. Desa Wisata Tembi juga memperoleh penghargaan *Asean Homestay Standard* pada tahun 2016 dan 2019 dari *Asean Tourism Forum*. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Desa Wisata sebagai berikut :

Dengan potensi, layout dan daya dukung masyarakat jadilah Kawasan GMT dan dilanjutkan dengan Desa Wisata Tembi. Desa Wisata Tembi itu ada Surat Keputusan dari Bupati juga belum lama 2015 kalau nggak salah. Itu kita sudah berjalan dan di tahun yang sama, Kita pernah menjuarai desa wisata terbaik di Bantul nggih. Di tahun 2016, kita menerima award *nggih* dari *Asean Tourism Forum* di Filipina dan belum lama ini kita menerima lagi yang 2019 di Vietnam itu karena *homestay*.⁶¹

4.2.2 Temuan Penelitian Subfokus Kapasitas Kelembagaan Ekonomi

Menurut pembahasan pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kapasitas kelembagaan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi beberapa komponen yaitu pengelolaan dan dukungan kelembagaan, peraturan yang diterapkan dalam kelembagaan, perubahan kelembagaan serta syarat dan aturan yang diterapkan kelembagaan dalam lingkungan sosial.

Adapun penemuan peneliti yang berhubungan dengan kapasitas ekonomi dalam aspek pengelolaan dan dukungan, diketahui bahwa terdapat dukungan dan pengelolaan yang baik dari Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi dalam pengembangan desa wisata. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan dan dukungan kelembagaan ekonomi Kelompok Sadar Wisata terhadap potensi, daya tarik wisata serta sarana dan prasarana yang ada pada Desa Wisata Tembi. Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara diketahui bahwa pengelolaan dan dukungan awal dilakukan pada objek dan daya tarik wisata di Desa

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

Wisata Tembi melalui pengelolaan rumah-rumah adat yang masih ada. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mengadakan pelatihan pembimbingan kepada masyarakat dalam penerimaan wisatawan baik dan pengelolaan *homestay* yang sesuai dengan standard. Pembinaan awal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Setelah itu pelatihan dilakukan oleh beberapa Universitas melalui kegiatan KKN di Desa Wisata Tembi. Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi juga turut memberikan pembinaan standarisasi *homestay* melalui kegiatan Lomba *Homestay*. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Desa Wisata sebagai berikut :

Untuk pembinaan, Bulan Februari ini akan kita adakan lomba homestay di Tembi. Jadi ada standarisasi homestay seperti apa yang layak dan disukai oleh wisatawan. Kita lombakan dan kita beri insentif uang pembinaan yang berkaitan dengan kelengkapan homestay. Untuk pembinaan dengan pemberian insentif ini baru pertama kali. Tapi untuk pembinaan yang tanpa pemberian insentif rutin dilakukan. Karna kita baru saja menerima award ya kita konsolidasikan dengan homestay yang ada. Jadi kedepan itu komponen yang dilombakan diantaranya toilet, homestay, Pokdarwis, dan desa wisata itu sendiri. Tahun ini akan dilombakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Jadi yang namanya industri pariwisata empat komponen itu harus eksis. Dulu juga melibatkan Universitas, Universitas Atma Jaya membina disini selama 2 tahun, yang membuat *wordpress*, gambar-gambar. Tahun 2010 dan 2011, Atma Jaya masuk disini. Kalau universitas yang lain hanya sabulan atau dua bulan masuk sini.⁶²

Aspek kedua adalah yang berkaitan dengan aturan baik formal maupun konvensional nonformal, serta cara berperilaku. Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan diketahui peraturan dalam kelembagaan tidak ada aturan yang secara formal berlaku pada Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi masih menggunakan nilai-nilai sosial yang sudah ada di masyarakat sejak dulu. Solidaritas antar warga juga masih terawat dengan baik. Sehingga kegiatan pariwisata yang dilakukan tetap bertujuan untuk

⁶² Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Tembi. Pokdarwis sebagai kelembagaan ekonomi dalam desa wisata berperan dalam mengatur pemasukan dan pembagiannya kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, terdapat aturan informal yang diterapkan berupa prinsip sebagai penyelenggara dan pengelola adalah kesiapan dalam menerima wisatawan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Desa Wisata sebagai berikut :

Untuk aturan formal tertera kita tidak ada, tapi kita punya prinsip karena kita sebagai penyelenggara yang menerima wisatawan. Yang pertama adalah senyum. Jadi dengan siapa pun yang masuk ke Desa Tembi kita beri senyuman. Jangan sampai wisatawan yang datang itu kecewa. Karena yang diharapkan wisatawan akan datang kembali ke Desa Tembi. Untuk kedatangan wisatawan dalam jumlah banyak atau kolektif diatas 25 atau 50 gitu mesti masuk sekretariat dulu. Nanti kita bagi-bagi. Kalau nggak gitu, nanti ada kecemburuan sosial.⁶³

Aspek ketiga berkaitan dengan perubahan yang terus terjadi sesuai dengan tingkat aktivitas yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan hambatan yang ada. Dari Hasil wawancara diketahui bahwa Desa Wisata Tembi terus melakukan koordinasi untuk terus mengembangkan strategi strategi baru dalam menghadapi perkembangan yang ada. Sehingga Desa Wisata Tembi dapat bertahan, berkelanjutan dan dapat menarik wisatawan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengelola Desa Wisata dan Ketua Kelompok Sadar Wisata diketahui bahwa pengurus Kelompok Sadar Wisata terus melakukan pertemuan yang membahas mengenai perkembangan pariwisata saat ini. Pertemuan ini dilakukan sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide baru dalam pengembangan desa wisata. Ide-ide yang disampaikan pengurus melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa wisata agar terus dapat bertahan dalam persaingan di bidang pariwisata. Dengan

⁶³ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

adanya pertemuan ini diharapkan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan, program baru yang unik sehingga dapat menarik minat wisatawan, baik itu secara luas keseluruhan Desa Wisata Tembi maupun sektoral pada masing-masing seksi. Sehingga dapat terbentuk aneka ragam atraksi wisata yang menari dan menjadi ciri khas yang menjadi pembeda dengan desa wisata yang lain. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Desa Wisata sebagai berikut :

Penguatan Pokdarwis yang terus dilakukan untuk menghadapi perkembangan yang ada kita sering ketemu, sering konsolidasi. Kita punya ide juga dari Pokdarwis, Desa wisata itu bikin gepuro untuk identifikasi desa wisata. Itu rencana mau dimulai hari ini di pintu gerbang masuk dari bambu yang justru menurut orang orang lebih menarik. Kalo penguatannya biar kita solid harus sering pertemuan kan terus harus punya trik-trik untuk menarik wisatawan. Soalnya yang namanya wisata kan harus sustainable, berkelanjutan *tho*, tidak hanya tampil terus ambruk gitu. Kita harus sustainable, gimana caranya biar wisataan itu nggak jenuh. Kita harus terus menggali potensi dan berinovasi. Kita rapat, mungkin temen-temen yang punya ide baru biar mengungkapkan maunya seperti apa, kita *floor* kan. Ide sektoral masing-masing kan pasti punya. Sebaiknya kuliner begini, sebaiknya tatanan di *front officenya* seperti ini. Kita jua melakukan *study* banding jadi biar nggak jenuh disini ngurusi kayak gitu aja, sambil rekreasi juga sambil menyerap ilmu di desa wisata yang lain. Kita liat pengembangannya seperti apa, yang baik nanti kita akomodir dan kita terapkan disini.⁶⁴

Aspek ini berkaitan dengan syarat dan larangan yang diterapkan dalam lingkungan sosial. Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan diketahui tidak ada peraturan formal yang diterapkan kelembagaan dalam lingkungan sosial. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Wisata dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi, diketahui bahwa Desa Wisata Tembi tidak menerapkan aturan secara tertulis. Bahkan untuk tamu yang datang ke *homestay* akan dilayani 24 jam. Hal ini disebabkan karena *Homestay* Desa Wisata Tembi

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

merupakan acuan *homestay* seluruh Indonesia, pada jam berapapun wisatawan akan tetap diterima selama terdapat identitas yang jelas. Namun, terkadang pengontrolan sulit dilakukan jika pemesanan *homestay* dilakukan melalui aplikasi online. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Desa Wisata sebagai berikut :

Kalo sini buka 24 jam, ada yang *stand by* disini. Kalo disini karna homestaynya sudah menjadi acuan homestay di seluruh Indonesia, kita *stand by* 24 jam asal ada identitas. Ada ktp itu harus. Kita harus hati hati menanyakan tujuan wisatanya. Kecuali yang lewat web. Kalau lewat web kita susah ngontrolnya misalnya lewat traveloka atau booking.com karena identitasnya terekam disana. Terus wisatawan kesini kan cuma nunjukan bukti kalau dia sudah *booking*. Untuk aturan sosial terkait kunjungan wisatawan ndak ada, bebas disini.⁶⁵

4.2.3 Temuan Penelitian Subfokus Ketahanan Ekonomi Daerah

Menurut pembahasan pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai ketahanan ekonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi beberapa komponen yaitu potensi kekayaan alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kapasitas pengelolaannya.

Potensi kekayaan alam mencakup kondisi alam yang ada di Desa Wisata Desa Tembi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya alam merupakan modal penting dalam pengembangan desa wisata dalam mewujudkan ketahanan daerah. Keberadaan Desa Wisata mewakili pemanfaatan sumber kekayaan alam. Kekayaan alam merupakan kekayaan yang menjadi ciri khas lokal yang dimanfaatkan menjadi usaha wisata serta direalisasikan sebagai objek wisata oleh Desa Wisata. Objek wisata yang ada berupa panorama dan nuansa alam pedesaan yang masih asri, rumah rumah tradisional, kebudayaan hingga kearifan lokal yang ada.

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

Potensi yang ada di Tembi rumah rumah adat seperti Joglo yang masih banyak itu kita kelola. Setelah gempa kan kita juga mendapat bantuan rumah yang ukuran dan bentuknya sama sejumlah seratus dua puluh lima waktu itu yang bisa dijadikan keunikan dengan adanya rumah yang sama. Nah pertama kali kita rancang kayak gitu. Kitakan wisata alternatif ya, jadi kalau orang orang dateng kan pasti tanya apa yang dilihat? Nah kita ada wisata budaya, wisata pertanian, wisata kuliner, dan kerajinan.⁶⁶

Aspek sumber daya manusia berkaitan dengan kesempatan kerja. Analisis yang dilakukan meliputi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata sehingga membuka kesempatan dan peluang kerja oleh desa wisata sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dawud Subroto bahwa pengembangan kegiatan pada desa wisata akan memberikan efek positif terhadap adanya peluang pekerjaan baru. Setiap unit kegiatan akan memerlukan tenaga sehingga akan berdampak pada masyarakat sekitar dalam pemenuhan tenaga tersebut.

Terkait dengan ketersediaan sarana prasarana wisata, diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang pengembangan desa wisata. Berdasarkan hasil dari wawancara Kepala Pengelola dan Ketua Kelompok Sadar Wisata diketahui bahwa pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang dialokasikan bersumber dari uang yang diperoleh dari pendapatan Desa Wisata Tembi. Hal ini disebabkan karena Desa Tembi sudah tergolong dalam desa wisata mandiri maka sudah tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Kapasitas pengelola ini berkaitan dengan upaya manajemen dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa terdapat upaya peningkatan kemampuan pengurus kelompok sadar wisata dan masyarakat setempat. Diungkapkan bahwa manajemen yang baik merupakan sebuah keuntungan tersendiri dalam pengelolaan sebuah organisasi. Sebagai sebuah lembaga, Kelompok

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

Sadar Wisata diupayakan agar dapat membuka ruang untuk peningkatan kemampuan anggota melalui keterlibatannya dalam pengembangan desa wisata. Peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi juga ditunjukkan melalui adanya pelatihan dan bimbingan terhadap pengurus untuk mewujudkan keberlanjutan desa wisata dan pengembangan kegiatan wisata.

Dulu awal mulanya tidak pengurus sendiri yang merencanakan. Awalnya ada MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bantul lalu ditunjuk universitas yang ada di Yogyakarta yaitu Atma Jaya. Di Universitas Atma Jaya ada program KKN Berkelanjutan di Desa Tembi pada 2008. Yang pertama kali dilakukan adalah penggalan potensi, pengembangan potensi. Program KKN terus bertahap hingga tahap mendatangkan wisatawan, menjual atau marketing, dan kerja sama dengan travel dan pelatihan-pelatihan yang lain. Kampus lain seperti Janabadra dan Duta Wacana juga masuk ke Tembi.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Pengelola dan Ketua Pokdarwis Desa Wisata di Kantor Sekretariat Desa Wisata Tembi, pada 13 Januari 2019.

4.3 Pembahasan

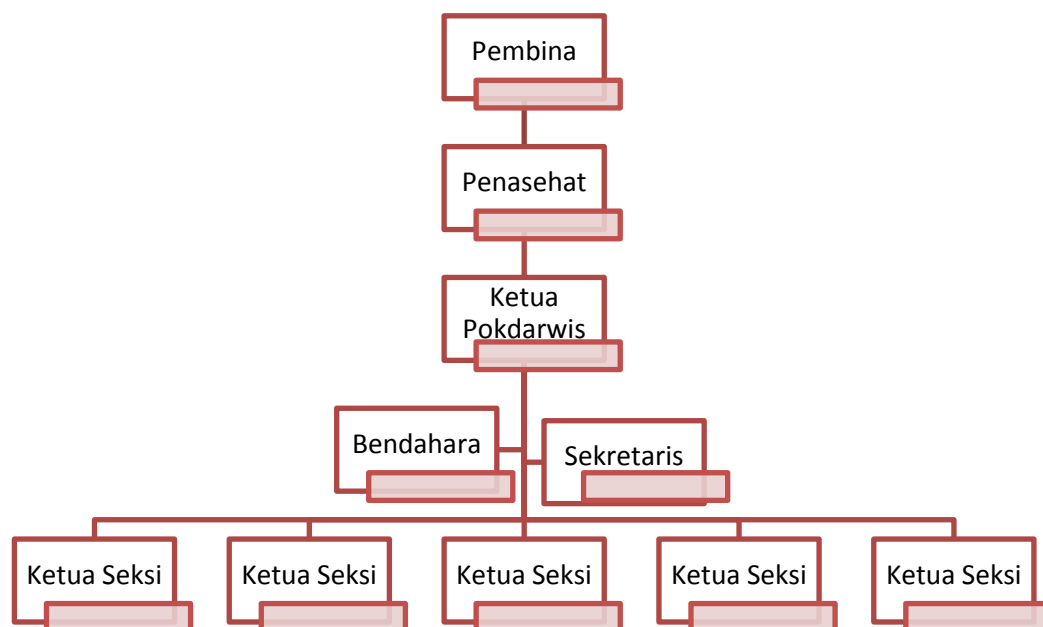
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas serta dikembangkan menurut variabel dan aspek dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dipaparkan pembahasan penelitian sesuai dengan teori dan pendapat para ahli yang dianalisis, dimaknai kembali dan dilihat kesesuaiannya dengan data sekunder yang diperoleh selama proses penelitian.

4.3.1 Struktur Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi

Desa Wisata Tembi memang telah banyak memikat wisatawan untuk datang mengeksplorasi suguhan pemandangan alam persawahan yang masih asri dan indah. Akan tetapi selain wisata alam, terdapat juga potensi wisata yang lain seperti budaya dan tradisi asli yang masih dipertahankan seperti arsitektur bangunan tradisional rumah Joglo dan berbagai macam peralatan tradisional yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Jawa pada jaman dulu. Pengelolaan dan pengembangan wisata yang optimal tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana wisata. Adanya akses dan ketersediaan infrastruktur seperti rumah tinggal dan *homestay* akan meningkatkan nilai tambah tersendiri selain keunggulan potensi alam yang sudah dimiliki oleh desa wisata. Keberhasilan dalam proses pengembangan desa wisata tidak terlepas dari peran sebuah institusi lokal atau kelembagaan ekonomi yang mengelola desa wisata tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pariwisata di Desa Wisata Tembi yaitu Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Wisata Tembi.

Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pembina, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Seksi Kegiatan serta anggota yang merupakan masyarakat Dukuh Tembi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai

Pembina, Bapak Lurah dan Bapak Dukuh sebagai Penasihat, Bapak Dawud Subroto sebagai Kepala Pengelola Desa Wisata dan Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak Munyani sebagai Bendahara, Bapak Aris Langgeng sebagai Sekretaris, serta Bapak Acuy sebagai Sekretaris dan Koordinator Ketua Seksi Kegiatan. Untuk Kegiatan Karawitan diketuai oleh Ibu Sukinah, Kegiatan Gejog Lesung diketuai oleh Ibu Ety, dan Kegiatan Musik Bang Bung diketuai oleh Bapak Sudirjo. Para Pengurus ini memiliki peran dalam pengaturan setiap aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata.



Gambar 4.5

Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi

Sumber : Data Diolah

Keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada awalnya merupakan pengelolaan kawasan wisata terintegrasi di Kabupaten Bantul yang dikenal dengan nama Kawasan GMT (Gabusan, Manding dan Tembi). Kawasan ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan membangun pariwisata terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian dengan adanya Kawasan GMT ini terbentuk pembagian daerah

tujuan wisata berdasarkan potensi yang dimiliki dan Dukuh Tembi ditetapkan sebagai desa wisata berbasis budaya dan kesenian. Pada tahun 2007, pengelolaan Desa Wisata Tembi masih berbentuk komunitas wisata yang merupakan pelaksana program dari pengurus pada Kawasan GMT dan rapat yang dilakukan oleh para warga Dusun Tembi. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dusun pada Kawasan GMT dapat berdiri sendiri. Manding dengan sentra kerajinan kulit menjadi Desa Wisata Manding, Gabusan dengan *showroom* pengrajin Kabupaten Bantul berdiri sendiri dengan pengelolaan manajemen dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, dan Tembi menjadi Desa Wisata Tembi yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Tembi pada tahun 2010 kemudian menjadi lembaga yang memegang tanggung jawab dalam keseluruhan aktivitas manajerial mulai dari perencanaan hingga pengembangannya. Selain itu, Peran Pokdarwis terlihat dalam pengelolaan potensi yang ada di desa wisata, peningkatan kualitas program atraksi wisata, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengembangan desa wisata.

Menurut Erani, kelembagaan merupakan konsep norma atau hak alami yang mengontrol tingkah laku dari individu. Definisi mengenai kelembagaan juga dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, apabila kelembagaan dimaknai berdasarkan prosesnya, sehingga kelembagaan merupakan sebuah upaya untuk membentuk sistem dalam berinteraksi antar pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi. Sedangkan bila dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan lebih berfokus untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan struktur kewenangan antar pelaku. Akan tetapi kelembagaan juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai tambah terhadap perekonomian.⁶⁸ Upaya pembentukan sistem dalam interaksi antar pelaku kegiatan tersebut diimplementasikan atau diwujudkan dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi yang terdiri dari para pengurus

⁶⁸ Ahmad Erani Yustika, *Op Cit.* hlm 25.

harian serta anggota yang merupakan masyarakat Dukuh Tembi. Sedangkan bila berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka Kelompok Sadar Wisata memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan pengembangan desa wisata untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan serta tercapai peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan.

Sedangkan menurut Djogo, Sunaryo dan Sirait, mendefinisikan bahwa kelembagaan merupakan sebuah rancangan pola dalam berperilaku secara sosial yang sudah tertanam dan terus berulang dalam jangka waktu cukup lama. Kelembagaan terdiri dari dua bagian utama yaitu kelembagaan dan keorganisasian. Dari segi kelembagaan berupa tingkah laku sosial yang pembahasannya mengenai norma, kepercayaan, nilai, gagasan, doktrin, kebutuhan, orientasi, keinginan dan lain sebagainya. Sedangkan segi keorganisasian berupa struktur sosial dimana pembahasannya mengenai peran, kegiatan, interaksi dari masing-masing peran, bauran sosial, perbandingan struktur secara teori dengan yang terjadi di sebenarnya, struktur pola kewenangan dan kekuasaan, sisi solidaritas serta kaitan antara aktivitas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁶⁹ Dari segi kelembagaan maka dapat dilihat melalui karakteristik khusus yang ada pada desa wisata yaitu adanya modal sosial seperti nilai-nilai, adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang khas sebagai dasar dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama masyarakat desa wisata maupun dengan wisatawan. Penguatan modal sosial dengan pemberdayaan masyarakat desa wisata merupakan solusi supaya modal sosial yang menopang desa wisata tidak hilang dan tetap terjaga dan desa wisata dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dari segi keorganisasian maka sejalan dengan Erani, kelembagaan diwujudkan dengan adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi yang terdiri dari para pengurus harian serta anggota yang merupakan

⁶⁹ Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, *Op Cit.* hlm 2.

masyarakat Dukuh Tembi yang memiliki peran masing-masing dalam pengembangan desa wisata.

Pentingnya keberadaan Kelompok Sadar Wisata dituangkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata⁷⁰ dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2015 yaitu Kelompok Sadar Wisata dapat dimengerti sebagai kelompok yang muncul berdasarkan inisiatif, kemauan, kemampuan, dan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemeliharaan dan pelestarian berbagai macam obyek dan daya tarik wisata yang ada dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut. Kelompok sadar wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kegiatan desa wisata dan mendukung kesuksesan pembangunan pariwisata nasional.

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini menggunakan sistem *bottom-up*. Dimana pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tembi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai fasilitator. Sehingga dengan adanya keberadaan Pokdarwis, Pemerintah telah mengupayakan pengembangan kelembagaan Pokdarwis dengan berbagai program-program pembangunan di bidang pariwisata. Program pengembangan juga dilakukan oleh Pokdarwis Desa Tembi sendiri diantaranya kegiatan pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan potensi wisata budaya dan kerajinan yang ada, peningkatan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus Pokdarwis, serta pelibatan peran serta masyarakat dalam memelihara potensi yang ada dan menciptakan atraksi wisata baru.

⁷⁰ Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Beberapa capaian telah diperoleh Desa Wisata Tembi sebagai hasil dari berbagai uraian kegiatan dalam pengembangan desa wisata yang telah dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Beberapa capaian tersebut diantaranya jumlah kunjungan wisatawan yang datang setiap bulannya mencapai kurang lebih 600 wisatawan pada hari biasa dan mencapai 900 kunjungan wisatawan pada masa liburan. Selain itu, Desa Wisata Tembi berhasil menjuarai desa wisata terbaik di Kabupaten Bantul pada tahun 2015. Desa Wisata Tembi juga memperoleh penghargaan *Asean Homestay Standard* pada tahun 2016 dan 2019 dari *Asean Tourism Forum*. Dengan capaian yang diperoleh ini maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, fungsi dan struktur kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan pada Desa Wisata Tembi. Tujuan untuk mengakomodir sapa pesona dalam pariwisata, meningkatkan kesejahteraan bersama bahkan menjadikan Desa Wisata Tembi bertaraf Internasional dapat tercapai dan dirasakan oleh keseluruhan anggota.

4.3.2 Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi

Kapasitas Kelembagaan merupakan kemampuan organisasi dalam pengembangan desa wisata yang dipengaruhi oleh pengelolaan dan dukungan, peraturan yang diterapkan dalam kelembagaan, perubahan kelembagaan serta syarat dan aturan yang diterapkan kelembagaan dalam lingkungan sosial. Kapasitas Kelembagaan dapat ditunjukkan dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menjadi lembaga yang tampil paling dominan di dalam penyelenggaraan atau beberapa aktivitas pengembangan wisata sehingga Pokdarwis ini dapat menjadi *local champion* yaitu individu atau kelompok setempat dengan kepeloporannya yang tinggi mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung kinerja Pokdarwis dan berpartisipasi pada suatu aktivitas pengembangan wisata di daerah tempat tinggalnya. Selain itu Kapasitas kelembagaan juga akan

berpengaruh dalam pengelolaan Desa Wisata Tembi. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pengelolaan potensi wisata dan perkembangan ragam atraksi wisata yang ada.

Menurut Milen, Kapasitas Kelembagaan merupakan level dalam organisasi yang berkaitan dengan struktur, budaya dan sistem tata kelola organisasi sehingga dapat mendukung individu untuk menunjukkan kompetensi yang maksimal. Sedangkan Menurut Damanik dan Weber, Kapasitas Kelembagaan merupakan keabilitas organisasi dalam proses kepemimpinan dan koordinasi, melakukan kerjasama eksternal, mengembangkan serta melakukan promosi pada produk dan destinasi wisata. Kapasitas kelembagaan ekonomi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah ditunjukkan dalam proses pengelolaan dan dukungan Wisata terhadap potensi, daya tarik wisata serta sarana dan prasarana yang ada pada Desa Wisata Tembi. Dukungan tersebut pengelolaan dan dukungan awal dilakukan pada objek dan daya tarik wisata di Desa Wisata Tembi melalui pengelolaan rumah-rumah adat yang masih ada. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mengadakan pelatihan pembimbingan kepada masyarakat dalam penerimaan wisatawan baik dan pengelolaan homestay yang sesuai dengan standard. Pembinaan awal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Setelah itu pelatihan dilakukan oleh beberapa Universitas melalui kegiatan KKN di Desa Wisata Tembi. Pokdawis Desa Wisata Tembi juga turut memberikan pembinaan standarisasi homestay melalui kegiatan Lomba Homestay. Kemudian dukungan dan pengelolaan desa wisata dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus Pokdarwis. Beberapa atraksi yang berhasil diadakan diantaranya seni tari, kesenian karawitan, kesenian bangung (alat musik yang berasal dari bambu), kesenian gejog lesung (kesenian yang berasal dari aktivitas tumbuk gabah), kerajinan handycraft (membatik kain, membatik topeng, membuat tempat pensil dan tempat

tisu, membuat keramik/tembikar, mewarnai tembikar, tatah sungging wayang serta membuat dan melukis kipas).

Berkaitan dengan peraturan formal maupun nonformal yang diterapkan dalam kelembagaan Kelompok Sadar Wisata hingga saat ini tidak terdapat aturan formal yang secara baku tertulis. Kelompok Sadar Wisata masih menggunakan aturan nonformal berupa nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sejak dulu. Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi dan warga masih menjunjung tinggi rasa solidaritas. Sehingga adanya pengelolaan kegiatan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tembi. Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi sebagai sebuah kelembagaan ekonomi memiliki peran dalam mengatur dan mengelola pemasukan dan pembagian dari kegiatan Desa Wisata Tembi kepada masyarakat yang turut terlibat. Untuk kedatangan wisatawan akan terlebih dulu terdaftar melalui sekretariat. Lalu akan ditempatkan pada *homestay* sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh wisatawan. Terlebih untuk kunjungan wisatawan secara kolektif misalkan diatas 25 atau 50, maka akan tetap didaftar terlebih dahulu melalui sekretariat. Lalu pembagian penempatan pada *homestay* akan ditentukan oleh pengurus Pokdarwis, untuk menghindari adanya kecemburuan sosial.

Prinsip informal lain yang diterapkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tembi berupa prinsip sebagai penyelenggara dan pengelola desa wisata yaitu kesiapan dalam menerima wisatawan yang datang. Pokdarwis dan anggota masyarakat harus mampu menjadi tuan rumah untuk setiap wisatawan yang berkunjung. Pengurus Pokdarwis dan masyarakat harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan bidang usaha serta dapat memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan. Hal yang tidak kalah penting adalah tetap menjunjung keramahan dan sopan santun dalam menerima wisatawan.

Berkaitan dengan perubahan yang terus terjadi di industri pariwisata bahkan di dunia sesuai dengan aktivitas dan hambatan yang

ada maka Pengurus Pokdarwis terus melakukan koordinasi untuk mengembangkan strategi-strategi baru dalam menghadapi perkembangan yang ada. Sehingga Desa Wisata Tembi dapat menjadi desa wisata yang berkelanjutan dan terus dapat menarik wisatawan. Salah satu strategi yang dilakukan Pokdarwis adalah dengan rutin melakukan pertemuan untuk membahas mengenai perkembangan pariwisata saat ini. Pertemuan ini dilakukan sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide baru dalam pengembangan desa wisata. Ide-ide yang disampaikan pengurus melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa wisata agar terus dapat bertahan dalam persaingan di bidang pariwisata. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan, program baru yang unik sehingga dapat menarik minat wisatawan, baik itu secara luas keseluruhan Desa Wisata Tembi maupun sektoral pada masing-masing seksi. Sehingga dapat terbentuk aneka ragam atraksi wisata yang menari dan menjadi ciri khas dan nilai tambah serta menjadi pembeda dengan desa wisata yang lain.

Pengembangan strategi dan pengelolaan desa wisata juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atraksi Wisata dapat dikatakan berhasil ketika pelaku memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan harus melalui beberapa proses transfer pengetahuan kepada generasi berikutnya agar peningkatan kualitas sumber daya manusia merata.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah menunjukkan kompetensi yang maksimal. Hal ini tercermin dalam proses kepemimpinan, koordinasi, kerjasama, pengembangan dan promosi pada desa wisata.

4.3.3 Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah

Konsep ketahanan nasional menurut Amin Ibrahim sebagai metode pemecahan persoalan pembangunan diformulasikan menjadi kekayaan alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta manajemen. Keempat elemen ini penting dalam mendukung pengembangan desa wisata sekaligus mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.⁷¹

Dusun Tembi dengan kondisi geografis yang masih alami didominasi dengan persawahan berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata. Daya tarik alam Desa Wisata Tembi sebagai salah satu faktor yang menentukan keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan, dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh kelompok sadar wisata sebagai potensi wisata. Sesuai dengan pengertian Sumber Daya Alam yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷² yakni unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Selain adanya kekayaan alam, ketahanan ekonomi juga harus didukung dengan adanya sumber daya manusia. Kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih baik. Ketersediaan tenaga kerja dapat menjadi penggerak pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja⁷³ adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

⁷¹ Amin Ibrahim, *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm.35.

⁷² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan adanya kekayaan alam serta terbukanya kesempatan kerja yang diciptakan dari pengembangan desa wisata maka akan meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam serta terbukanya unit usaha sesuai potensi yang dimiliki oleh desa wisata membuka kesempatan penggunaan tenaga kerja lokal. Kontribusi desa wisata dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan adanya unit-unit kegiatan di desa wisata yang tentunya membutuhkan tambahan tenaga kerja. Unit-unit kegiatan tersebut diantaranya pengelolaan *homestay*, kegiatan out bound, kegiatan kesenian dan kuliner. Beberapa unit kegiatan kesenian dan kuliner yang berhasil diadakan diantaranya seni tari, kesenian karawitan, kesenian bangbung (alat musik yang berasal dari bambu), kesenian gejog lesung (kesenian yang berasal dari aktivitas tumbuk gabah), kerajinan handycraft (membatik kain, membatik topeng, membuat tempat pensil dan tempat tisu, membuat keramik/tembikar, mewarnai tembikar, tatah sungging wayang serta membuat dan melukis kipas). Dengan adanya pengelolaan *homestay* dan unit kegiatan ini membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di desa dan dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Di Desa Wisata Tembi saat ini tersedia 92 *homestay* non ac milik warga dengan *rate* harga Rp 75.000,00. Jika jumlah wisatawan yang datang setiap bulannya berkisar 600 pengunjung pada hari-hari biasa. Maka perputaran uang yang masuk ke Desa Wisata tiap bulan dari pengelolaan *homestay* sebesar Rp 45.000.000,00. Dengan pemasukan ini maka dapat menambah penghasilan warga masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan.

Selain itu adanya sarana prasarana dan kelembagaan berperan dalam pemanfaatan terhadap kekayaan dan tenaga kerja. Sarana dan prasarana menjadi alat penunjang dalam mempercepat pengembangan potensi objek wisata. Sarana dan prasarana juga terkait dengan fungsi dan tujuan yang menggambarkan kapasitas dari kelompok sadar wisata. Pengembangan sarana dan prasarana Desa Wisata Tembi telah

terbangun melalui peran aktif Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Akan tetapi Pokdarwis akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada kapasitasnya dalam pengelolaan dan kepengurusan melalui bimbingan, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mencapai tujuan Desa Wisata Tembi. Perbaikan kapasitas Pokdarwis Desa Tembi telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap pengurus Kelompok Sadar Wisata.

Dapat disadari bahwa peluang dan kesempatan pemanfaatan kekayaan alam sangat luas bila dikembangkan oleh Pokdarwis Desa Wisata Tembi sehingga dapat bermanfaat dalam perluasan lapangan pekerjaan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai disadari juga dapat memperkuat kapasitas Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Dari beberapa pandangan diatas bahwa kapasitas kelembagaan ekonomi dalam hal ini Pokdarwis untuk memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasaran telah dilakukan secara maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

Sementara itu, parameter ketahanan ekonomi dalam berbagai indikator, yaitu: (a) tingkat kemiskinan, (b) tingkat pengangguran, (c) ketimpangan pendapatan antar penduduk, (d) *purchasing power parity*, (e) tabungan dan investasi masyarakat, serta (f) pertumbuhan penerimaan pajak per tahun dan presentase pemasukan pajak terhadap PDRB.⁷⁴ Pengembangan Desa Wisata Tembi ini dapat mendukung terwujudnya ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat dalam penguatan ekonomi lokal serta pelestarian potensi wisata alam dan budaya yang ada pada desa wisata Tembi yang dilihat dari berbagai aspek.

⁷⁴ Lemhannas. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2014).

Bila dilihat dari parameter tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, dengan adanya pengelolaan Desa Wisata Tembi ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pengembangan desa wisata dapat menjadi sebuah peluang pekerjaan baru di desa. Bila sebelumnya masyarakat di Desa Tembi hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan sebagai buruh/ pekerja dalam industri, maka dengan adanya pengembangan Desa Tembi sebagai desa wisata dapat menyerap tenaga kerja lokal ada. Hal ini dapat dilihat dari pembagian hasil yang diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa wisata maupun pengelolaan *homestay* oleh Pokdarwis setelah adanya kunjungan wisatawan. Sehingga dari pembagian hasil tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di masyarakat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti serta disajikan secara mendalam maka dikemukakanlah beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan diharapkan dapat bermanfaat bagi kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kesimpulan tersebut peneliti paparkan secara sistematis sebagai berikut :

1. Peran, fungsi dan struktur kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan pada Desa Wisata Tembi. Tujuan untuk mengakomodir sapa pesona dalam pariwisata, meningkatkan kesejahteraan bersama bahkan menjadikan Desa Wisata Tembi bertaraf Internasional dapat tercapai dan dirasakan oleh keseluruhan anggota.
2. Kapasitas kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah menunjukkan kompetensi yang maksimal. Hal ini tercermin dalam proses kepemimpinan, koordinasi, kerjasama, pengembangan dan promosi pada desa wisata.
3. Pokdarwis telah memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasarana secara maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

5.2 Rekomendasi

Sebagai penutup dari penelitian ini disajikan rekomendasi terutama bagi pemerintah daerah serta peneliti selanjutnya sebagai upaya perbaikan sekaligus pengembangan penelitian selanjutnya. Rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

1. Praktis

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dikarenakan penelitian yang dilakukan menjumpai beberapa keterbatasan diantaranya waktu, pedoman wawancara serta pembiasan dikarenakan tinjauan kebijakan, objek penelitian serta jenis usaha yang dibatasi sehingga :

- a. Temuan potensi wisata yang masih terbatas pada kebudayaan dan pengelolaan homestay, sehingga diharapkan dapat dikembangkan pengelolaannya dengan mencontoh prototipe desa wisata yang sudah berkembang dikelola oleh BUMDES dan menciptakan unit-unit usaha baru yang berkembang menjadi lembaga ekonomi.
- b. Temuan karakteristik wilayah yang belum dimanfaatkan sebagai potensi wisata terlalu dibatasi di lingkup Desa Wisata Tembi, sehingga diharapkan penelitian berikutnya meningkatkan cakupan pada lingkup Desa Wisata lain atau skala Kabupaten serta Provinsi sehingga memperlihatkan sinergitas pemerintah dan pihak lainnya.
- c. Temuan usaha wisata yang belum dimaksimalkan Desa Wisata dapat diperluas menjadi unit wisata yang lain sehingga diharapkan nantinya kelanjutan penelitian dapat merepresentasikan keseluruhan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunn, Clare A. 2002. *Tourism Planning: Basics, Concept, Cases*. New York: Taylor and Francais.
- Hary Hermawan. 2016. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata*. Volume 3 (2).
- Ibrahim, Amin. 2006. *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2018. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*.
- Kementerian Pariwisata. 2015. *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. "Visi Misi Kemenpar, Homestay dan Progress Homestay", dalam <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3740> , diakses pada 31 Agustrus 2018.
- Kusumasari, A. D. 2014. "Peran Karang taruna dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga : Studi di Karang Taruna "Widya Taruna", Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Tesis Magister*. Universitas Gajah Mada.
- Lembaga Ketahanan Nasional. 2014. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*.


- Mubyarto. 2016. *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Prafitri, Gita Ratri dan Maya Damayanti. 2016. "Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)". *Jurnal Pengembangan Kota*. Volume 4 (1).
- Probovury, Ratih Azka. 2018. "Pengembangan Industri Kreatif Eceng Gondok Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Semarang". *Tesis Magister*. Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Putra, Theofilus Retmana. 2016. "Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Volume 9 (3).
- Sastrayuda, G. S. 2018. "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata". *Jurnal Info Sosial Ekonomi*. Volume 2 (1).
- Sidiq, Ade Jafar dan Risma Resnawaty. 2017. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Patisipasi Masyarakat Lokal di Desa Linggarjati Kuningan, Jawa Barat". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 4 (3).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- United Nation World Tourism Organization. 2015. *Glossary of Tourism Term*.
- Uphoff and Louise B. 2006. *Strengthening Rural Local Institutional Capacities*. Washington DC: Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD).
- World Economic Forum. 2017. *The Travel and Tourist Competitiveness Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Yusuf, Ilma Fatimah, Edhi Martono, dan Agus Prasetya. 2016. "Peran Pemuda dalam Pengembangan Eduwisata Energi Terbarukan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Desa

Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Ketahanan*. Volume 22 (3).

Zakaria, Faris dan Rima Dewi Suprihardjo. 2014. "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Teknik Pomits*. Volume 3 (2).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
Nomor	: BI 3040 IXI/2018	Bogor, 12 November 2018
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	Kepada
Hal	: Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data	Yth. 1. Kepala Desa Tembi Kab. Bantul 2. Kepala Pengelola Desa Wisata Tembi Kab. Bantul Prov. D.I.Y
		di Yogyakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Kurnia Dewi Swapradinta, NIM: 120170203014, nomor HP: 081328381997, email: kurnia.swapradinta@mp.idu.ac.id/swapradinta@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: 'Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)'

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Gubernur Prov. D.I.Y.
3. Warek / Kasatwas Unhan
4. Ketua LPPM Unhan
5. Camat Sewon Prov. D.I.Y
6. Bupati Bantul Prov. D.I.Y.

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia : tahun

Jabatan/Peran :

Alamat :

.....

Daftar pertanyaan!

1. Bagaimana pengelolaan potensi Desa Wisata Tembi?
2. Bagaimana kapasitas kelompok sadar wisata dalam pembentukan konsep awal Desa Wisata Tembi?
3. Bagaimana kapasitas kelompok sadar wisata dalam pengembangan potensi Desa Wisata Tembi?
4. Bagaimana kelompok sadar wisata dalam membentuk keahlian untuk berinteraksi dengan wisatawan? Seperti pelatihan dalam berinteraksi dan pemilik homestay
5. Bagaimana peran kelompok sadar wisata dalam mengelola daya tarik desa wisata serta mengelola sarana dan prasaran pendukung?
6. Bagaimana pengelolaan dan dukungan kelompok sadar wisata secara sosial?
7. Adakah peraturan di dalam kelompok sadar wisata, baik formal maupun nonformal?
8. Apakah struktur kelompok sadar wisata melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial terkini?
9. Apakah kelompok sadar wisata menetapkan aturan yang diterapkan dalam lingkungan social terkait kunjungan wisatawan?

10. Berapa jumlah penduduk miskin di Desa Tembi?
11. Berapa jumlah pengangguran di Desa Tembi?
12. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di Desa Tembi?
13. Bagaimana tingkat *purchasing power parity* di Desa Tembi?
14. Bagaimana tingkat tabungan dan investasi masyarakat?

LAMPIRAN 3. DOKUMEN PENDUKUNG



